



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EFEKTIVITAS ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**NAZALYUS  
NIM. 015551495**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2012**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAZALYUS  
NIM : 015551495  
Program : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul TAPM : Efektifitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan kelulusan saya.

Pangkalpinang, 11 Maret 2010

Yang menyatakan,



NAZALYUS

## Abstract

### The Organizational effectiveness of Regional Development Planning Agency and Statistics Province of Bangka Belitung Archipelago.

Nazalyus

Universitas Terbuka

[nazalyus05@yahoo.com](mailto:nazalyus05@yahoo.com)

**Key Word: Effectivities, Development, Optimize, Planning**

To ensure the direction of more structured development and implementation is going well, needed a quality planning, integrated, holistic and comprehensive. If all the planning procedures can be implemented in a timely, accurate and appropriate material in the mechanism, it is expected that planning documents produced will be better quality and more toward the achievement of objectives medium term development plan (RPJM). Planning documents referred to, which is one of Bappeda and Statistics task in managing and preparing it, just might be resolved in the effectiveness of the organization is going well.

The main theory is used in assessing the organizational effectiveness of Bappeda and the statistics is the goal approach model, system approach and behavior approach model by Richard Steers. While the theory of its application (applied theory) are:-Rational Goal Model; - Human Relations Model; - External Relations Model and Internal relations Model, which is developed by Azhar Kasim. From These concepts, researcher focused in research by “ *Rational Goal Model*”, with define some interaction between organization structure, planning processing and then compound with established documents .

The method is used in the completion of this thesis is “*Positivim Approach*” developing by Lawrence W. Neuman, that one of qualitative approach, by using interview techniques, classification (the translation) the results of interviews and group them in clusters of information sources (triangulation). Systemic approach in this case is used in the study organizational structure will affect the effectiveness of the organization. Instead of organizational effectiveness can also be measured by the achievement of objectives (goals) of the organization. Based on the data’s and informant “content analysis”, validity and “cross check” of triangulation method, shown that the relation among Organization Structure, Planning Process and Documents result in order to achieve the Organization Goals (Rational Goal Model) of Regional Board Planning and Development of Bangka Belitung Archipelago Province (Bappeda & Statistic of Bangka Belitung Archipelago Province).

Interview and data analysis shows that the Regional Planning Agency and Statistic is effective enough to do their job an duty, especially to produce the main document products, such as Long-Term Regional Planning and Development

RPJPD, Mid-Term Regional Planning and Development RPJMD, Institution Strategic Planning (*Renstra* SKPD), General Budgeting Policy (KUA), Temporary Priority Budgeting Plafond (PPAS), Planning and Development Summit (*Musrenbang*) Documents, Institutional Forum Summit (*Forum SKPD*) Documents, etc but meanwhile overlapping assignments and free work outside the main tasks, as well as the lack of personnel with the status of "permanent functional", becomes one of the reasons the organization of Bappeda and Statistics the Province of Bangka Belitung Archipelago is not maximize to pursue the goals. The reorganization and evaluation of organizational structure and review of the basic tasks and functions (*tupoksi*) of Bappeda which is necessary. Accompanied by policy towards stabilization of the core strategy. Special incentives and remuneration may also need to be realized.

Universitas Terbuka

## ABSTRAK

### Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nazalyus

Universitas Terbuka

[nazalyus05@yahoo.com](mailto:nazalyus05@yahoo.com)

**Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan, Optimalisasi, Perencanaan**

Untuk menjamin arah pembangunan lebih terstruktur dan pelaksanaannya berlangsung dengan baik diperlukan adanya perencanaan yang berkualitas, terpadu, holistik dan komprehensif. Apabila semua prosedur perencanaan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat materi dan tepat mekanismenya, maka diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih bermutu dan lebih mendekati pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dokumen-dokumen perencanaan dimaksud, yang merupakan salah satu tugas Bappeda dan Statistik dalam menyusun dan mempersiapkannya, hanya mungkin terselesaikan kalau efektivitas organisasinya berlangsung dengan baik.

Teori utama yang digunakan dalam mengkaji efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik adalah model pendekatan tujuan, model pendekatan sistem dan model pendekatan perilaku oleh Richard Steers. Sedangkan teori-teori terapannya (*applied theory*) adalah: *Rational Goal Model*; Model Hubungan Manusia; Model Hubungan Eksternal; dan Model Hubungan Internal yang dikembangkan oleh Azhar Kasim. Dari konsep-konsep ini, penulis menitikberatkan penelitian pada "Rational Goal Model", dengan menghubungkan antara struktur organisasi, proses perencanaan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan.

Metode yang digunakan dalam penyelesaian thesis ini adalah "*Positivism Approach*" yang dikembangkan oleh Lawrence W. Neuman, yaitu suatu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, klasifikasi (penjabaran) hasil wawancara dan mengelompokkannya dalam kluster sumber informan (triangulasi). Pendekatan kesisteman dalam hal ini digunakan kajian struktur organisasi yang akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Sebaliknya efektivitas organisasi dapat juga diukur dengan prestasi pencapaian tujuan (*goal*) dari organisasi tersebut. Berdasarkan "*content analysis*", uji keabsahan, dan "*cross check*" sumber data/informan dengan menggunakan metode "*triangulation*", terlihat adanya hubungan antara struktur organisasi, proses perencanaan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam mencapai tujuan organisasi ("*Rational Goal Model*"), Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wawancara dan hasil pembahasan menunjukkan bahwa organisasi Bappeda dan Statistik sudah cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam

menghasilkan produk-produk dokumen utama seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Dokumen Forum SKPD, dll, meskipun tumpang tindih penugasan dan beban pekerjaan diluar tugas utama, serta belum adanya pegawai yang berstatus “fungsional perencana”, menjadi salah satu sebab belum maksimalnya pencapaian tujuan organisasi.

Reorganisasi dan evaluasi terhadap struktur organisasi dan pengkajian ulang terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappeda perlu dilakukan. Disertai dengan kebijakan terhadap pemantapan strategi inti, pemberian insentif khusus dan remunerasi mungkin juga perlu segera direalisasikan.

Universitas Terbuka

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telp.0217415050, Fax 021.7415588

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)  
PROGRAM MAGISTER SAINS DALAM ILMU ADMINISTRASI  
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : NAZALYUS  
NIM : 015551495  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

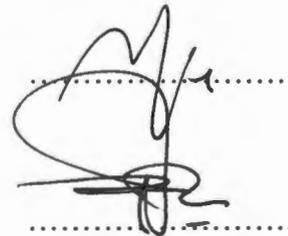
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Minggu, 10 Oktober 2010  
Waktu : 13.00-15.00

Dan Telah dinyatakan LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua  
Komisi Penguji : Dr. Maman Rumanta, M.Si



Penguji Ahli : Dr. Entang



Pembimbing I : Prof. DR. Azhar Kasim., MPA



Pembimbing II : DR. Sofjan Aripin., M.Si



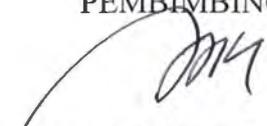
## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN STATISTIK PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

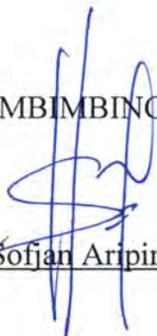
Penyusun TAPM : NAZALYUS  
NIM : NIM.015551495  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Hari/Tanggal :

Menyetujui:

PEMBIMBING I

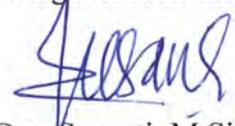
  
Prof. DR. Azhar Kasim, MPA

PEMBIMBING II

  
DR. Sofjan Aripin, M.Si

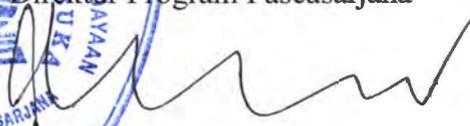
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/  
Program Magister Administrasi Publik

  
Dra. Susanti, M.Si  
NIP. 196712141993032002



Direktur Program Pascasarjana

  
Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA  
NIP. 194510071973021001

## KATA PENGANTAR

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang dibuat ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai perkuliahan sampai penulisan TAPM ini, penulisan dan penyelesaian TAPM ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati., M.Ed., Ph.D;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. DR. Azhar Kasim, MPA dan Pembimbing II, Bapak DR. Sofjan Aripin, M.Si, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian TAPM ini;
5. Kepala Bidang Magister Administrasi Publik, selaku penanggungjawab Program;
6. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ir.H. Eko Maulana Ali, S.Ap, SIP, M.Sc, yang telah memberi izin belajar dan bantuan moril serta materil selama penulis mengikuti pendidikan ini;
7. Istri, anak-anak dan semua kerabat yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan;
8. Para sahabat, teman-teman seangkatan, rekan-rekan sejawat yang telah membantu dalam penyelesaian berbagai tugas, khususnya penyelesaian TAPM ini.

Penulis menyadari, masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan TAPM ini, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu berkenan memberikan rahmatNya bagi kita semua. Amin

Pangkalpinang, Juli 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstract .....	i
Abstrak .....	iii
Lembar Pengesahan .....	v
Lembar Persetujuan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	9
1. Organisasi .....	9
a. Organisasi Sebagai Wadah .....	9
b. Organisasi Sebagai Proses .....	10
c. Organisasi Sebagai Sistem .....	10
1) Model System Tertutup ( <i>Closed Model</i> ) .....	11
2) Model System Terbuka ( <i>Open Model</i> ) .....	12
3) Gabungan Antara Kedua Model Tersebut ( <i>Syntesis Model</i> ) .....	13
d. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan .....	14
2. Efektivitas Organisasi .....	15
3. Efektivitas Organisasi Publik .....	22
4. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	23
B. Kerangka Berpikir .....	27
C. Definisi Operasional .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan .....	46
1. Struktur Organisasi .....	47
2. Proses Perencanaan .....	62
3. Dokumen Perencanaan .....	74
4. Uji Keabsahan .....	80

B. Pembahasan.....	88
1 Struktur Organisasi.....	89
2 Proses Perencanaan.....	97
3 Dokumen Perencanaan.....	104
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	124

Universitas Terbuka

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tipologi Pemerintahan .....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	4
Tabel 2.1 Indikator Efektivitas Organisasi .....	32
Tabel 4.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .....	64
Tabel 4.2 Pegawai Negeri Sipil Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan urutan kepangkatan .....	93
Tabel 4.3 CPNS Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan urutan kepangkatan .....	94
Tabel 4.4 Pegawai Negeri Sipil Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan latar belakang pendidikan .....	94
Tabel 4.5 Realisasi Capaian Pelaksanaan Program Dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008-2009 .....	108

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.2 Instrumen Perencanaan Pembangunan.....	5
Gambar 2.1. Pola Dasar Sebuah Model Sistim Terbuka.....	12
Gambar 2.2 Hipotesis Pengaruh Lingkungan terhadap Efektivitas Organisasi.....	13
Gambar 2.3 Lima Strategi.....	15
Gambar 4.1 Rumusan Hasil Wawancara.....	88
Gambar 4.2 Siklus Perencanaan.....	105

Universitas Terbuka

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman dan Daftar Wawancara Efektivitas Organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	124
Lampiran 2. Struktur Organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	159
Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	160

Universitas Terbuka

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desentralisasi Pemerintahan menjadi isu penting dan menarik dikalangan pengambil keputusan, bahkan semenjak berdirinya Negara Indonesia ide desentralisasi sudah di cetuskan. Momentum untuk melaksanakan desentralisasi mengalami jatuh bangun. Kondisi ini sangat di pengaruhi oleh keinginan politik dari para pengambil keputusan di negara ini. Pasang surut dan desakan untuk melaksanakan desentralisasi sudah dilaksanakan pada setiap orde, namun hegemoni keinginan politik terbentur dari pemimpin negri ini, dan puncaknya secara nyata momentum itupun terbuka dengan di mulainya Undang-Undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999. Pemberlakuan otonomi daerah ini akhirnya di revisi dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Memasuki milenium ketiga, globalisasi pada mulanya hanya sebuah kecenderungan, namun kenyataannya hal itu telah menjadi realitas. Globalisasi menuntut adanya berbagai standar, pengaturan, kewajiban dan sekaligus juga memberikan hak kepada anggota masyarakat *global*. Tuntutan berkompetisi dan berkolaborasi memaksa untuk terus menerus meningkatkan daya saing bangsa.

Sementara itu di era reformasi saat ini memungkinkan untuk menelaah dan memperbaiki dampak negatif dari sentralisasi masa lalu, karena pola sentralisasi selain mengabaikan inisiatif masyarakat juga cenderung

menghilangkan proses pengambilan keputusan yang di dasarkan pada kriteri - kriteria obyektif berdasarkan data dan informasi. Setelah beberapa dasawarsa di bawah sistim sentralistis, kebijakan pucuk pimpinan seringkali menjadi satu satunya acuan yang harus di ikuti, akibatnya keputusan lebih banyak di lakukan atas dasar kesesuaian dengan kebijakan atasan dari pada berdasarkan data, fakta dan informasi.

Pelaksanaan desentralisasi sistim Pemerintahan di maksudkan sebagai kehendak untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengembangkan fungsi dan tugasnya, yaitu diantaranya dengan pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana tugas-tugas Pemerintah pusat, akan tetapi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menampung aspirasi warganegara di wilayahnya, berupa rumusan rencana-rencana pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan riil daerah (Bappenas, 2002:40).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 dimana tujuan pembentukannya adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik.

Tugas-tugas penting seperti penyusunan pola dasar pembangunan daerah, menyusun RPJMD, menyusun program tahunan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, melakukan koordinasi perencanaan dan penelitian, serta memonitor pelaksanaan rencana pembangunan merupakan

aktivitas utama yang dikerjakan oleh Bappeda dan Statistik. Tugas yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah ini ditekankan dengan keharusan untuk menjaga agar kegiatan pembangunan itu mempunyai dampak positif terhadap pengembangan sektor swasta, lapangan kerja, usaha Pemerintahan, pembinaan pengusaha ekonomi lemah, pemakai produksi dalam negeri serta peningkatan produksi ekspor dan pariwisata.

Tabel.1.1  
Tipologi Organisasi Pemerintahan

Jenis Organisasi	Contoh
* Kebijakan	: Gubernur, Bappeda
* Pengaturan	: Sekretarian Daerah, Dinas Kominfo, BKPM
* Penyampai Pelayanan	: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Pelanggan Eksternal	
- Pelanggan Internal	Bappeda, BPS, Biro Umum
* Penegakan	
- Penegakan Eksternal	: Kepolisian, Kejaksaan, Dep.Hukum dan Ham, Disnaker (K3), BPK
- Penegakan Internal	Auditor/Inspektorat Wilayah, BPKP

Sumber: Osborne dan Plastrik (1997)

Dari pengamatan sementara memberikan indikasi bahwa Bappeda dan Statistik belum sepenuhnya mampu mengemban tugas yang di bebaskan kepadanya. Mutu perencanaan yang masih jauh dari yang di harapkan, lemahnya koordinasi pembangunan berbagai sektor dan kurang di manfaatkannya hasil-hasil penelitian bagi perencanaan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa, tujuan pembangunan adalah:

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antardaerah dan antarwarga masyarakat (pemerataan dan keadilan);
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan;

3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah;
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)

Sebagai sebuah Provinsi baru, yang dibentuk berdasarkan Undang undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 21 November 2000, perencanaan pembangunan merupakan suatu masalah yang sangat relevan untuk dibicarakan. Persoalan akan semakin menarik apabila dikaitkan dengan keberadaan Provinsi ini sebagai suatu wilayah kepulauan. Selain terdiri dari 2 (dua) pulau besar (Pulau Bangka dan Pulau Belitung), terdapat 468 Pulau pulau kecil. Situasi kepulauan seperti ini tentu saja akan mempengaruhi pola perencanaan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.2  
Jumlah Pulau Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten / Kota	Jumlah hasil Verifikasi	Berpenghuni
1	Kabupaten Bangka	48	1
2	Kabupaten Bangka Barat	89	0
3	Kabupaten Bangka Tengah	20	6
4	Kabupaten Bangka Selatan	59	8
5	Kabupaten Belitung	111	15
6	Kabupaten Belitung Timur	141	19
7	Provinsi	2	2
Jumlah Total		470	51

Sumber: Hasil Verifikasi Timnas Pembakuan nama Rupa Bumi (Juli 2008)

Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda dan Statistik berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012.

Gambar 1.2



Sumber: UU No.25 Tahun 2004

Gambar di atas menunjukkan keterkaitan antara RPJMD dan RPJM Nasional yang dipadukan pada saat pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Fakta yang berkaitan dengan latar belakang penelitian ini ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. *Grand Design* pembangunan dan Strategi pencapaiannya belum tersusun secara lengkap;
2. Sektor-sektor unggulan dan kegiatan prioritas yang ada dalam RPJMD, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dilain pihak kontribusi APBD Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk membiayai sektor-sektor ini relatif masih kecil.

3. Dokumen hasil Musrenbang dan Forum SKPD mengalami perubahan-perubahan mulai dari penyusunan RKPD, Penyusunan KUA, PPAS hingga penyusunan/penetapan usulan APBD;
4. Waktu penyampaian dan pembahasan dokumen perencanaan yang belum tepat waktu, termasuk juga penyampaian dan rekapitulasi laporan realisasi kegiatan yang selalu terlambat;
5. Hasil monitoring dan evaluasi masih bersifat normatif dan sebagai kumpulan data semata, belum digunakan sebagai alat penentu kebijakan;
6. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dan antar daerah;
7. Standard kompetensi belum sepenuhnya diterapkan dalam penempatan pegawai/staff yang akan bertugas di Bappeda dan Statistik.

Sebagai salah satu lembaga birokrasi maka Bappeda dan Statistik menerapkan pola prinsip-prinsip dalam tatanan organisasi, yaitu:

- Tersentralisasi dan hierarkis, yaitu merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Dituntut oleh aturan, yaitu oleh hukum atau peraturan-peraturan administratif yang stabil, dalam menjalankan mekanisme kerjanya;
- Terstandarisasi dan *impersonal*, yaitu memberikan perlakuan dan pelayanan sama kepada setiap SKPD/*Stake holder* dan Masyarakat;
- Menggunakan proses dan prosedur administratif dalam mencapai tujuan;
- Penempatan staf berdasarkan ujian dan kompetensi, bukan berdasarkan kriteria subjektif.

Dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa di dalam proses perencanaan dan pencapaian organisasi, Bappeda dan Statistik belum berfungsi secara optimal. Terdapat berbagai fungsi yang sampai saat ini belum dapat dijalankan secara baik, misalnya fungsi Statistik, fungsi Penelitian dan Pengembangan. Selain itu Bappeda dan Statistik, memerlukan Aparatur yang berstatus fungsional perencana, agar dapat menjamin kesinambungan perencanaan, simultan dan terarah serta memenuhi unsur-unsur holistik dan "tanpa kepentingan sektoral". Sampai saat ini belum terdapat petugas yang berstatus "Fungsional Perencana" pada kantor Bappeda dan Statistik. Idealnya dibutuhkan paling tidak 8 (delapan) orang fungsional perencana. Belum lagi, beberapa petugas yang telah dilatih pendidikan dan latihan perencanaan oleh Pusat Pembinaan Diklat Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas, telah dimutasikan pada SKPD lain.

Melihat pentingnya lembaga Bappeda dan Statistik sebagai lembaga perencana pembangunan di daerah, maka pengembangan kelembagaan Bappeda dan Statistik di Daerah harus segera dilakukan, untuk itu perlu dicari upaya yang tepat agar prestasi Bappeda dan Statistik dapat meningkat.

Agar dapat dirumuskan suatu saran pengembangan yang tepat, maka diperlukan sebuah penelitian untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi Bappeda dan Statistik tersebut, dan saran-saran kebijakan bagi peningkatan efektivitas Bappeda dan Statistik dikaitkan dengan tujuan organisasi, serta dihubungkan pula dengan struktur organisasi, proses perencanaan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan, sebagai suatu prestasi kerjanya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikaitkan dengan tujuan pembentukan organisasi (*rational goal model*) dan tugas pokoknya, serta dinamika lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya.

## D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan guna dari penelitian ini di harapkan:

1. Secara teoritis untuk mencermati efektivitas ditinjau dari metode pengukuran efektivitas dengan melihat struktur organisasi yang "existing" saat ini, serta kemungkinan perubahannya kedepan;
2. Secara praktis diharapkan menjadi masukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mengefektifkan lembaga Bappeda dan Statistik dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan daerah yang baik, serta sebagai sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak yang turut terlibat dalam proses perencanaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori.

##### 1. Organisasi

Organisasi menurut Desler (1985:116) adalah sebagai pengaturan sumberdaya dalam suatu kegiatan kerja di mana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara sistimatis untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan pada organisasi tersebut masing masing *personal* yang terlibat di dalamnya di beri tugas, wewenang dan tanggung jawab yang di koordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan tersebut di rumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang di wujudkan secara bersama-sama.

Sedangkan menurut Siagian (1997:138-141), mendefinisikan organisasi adalah, semua bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang lain yang di sebut bawahan.

Secara sederhana Etzioni (1982:3) mendefinisikan, organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama kelompok manusia di bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yaitu :

##### a. Organisasi Sebagai Wadah

Jika di pandang sebagai wadah maka organisasi merupakan sesuatu yang statis. Dalam hal ini organisasi merupakan tempat dimana

aktivitas administrasi dan manajemen di jalankan sebagai tempat atau wadah aktivitas maka pola dan struktur organisasi harus di buat atas landasan yang kuat dan pemikiran yang matang. Hal ini di perlukan unuk mengatisipasi berbagai perubahan dalam organisasi, baik tujuan, aktifitas pimpinan maupun anggotanya. Dengan Organisasi yang kuat dan solid maka perubahan tersebut tak membuat organisasi tersebut harus berubah.

#### **b. Organisasi Sebagai Proses**

Sebagai suatu proses maka organisasi merupakan sesuatu yang dinamis organisasi menjalani suatu proses yang merupakan aktifitas kerja dalam organisasi yang menghasilkan suatu produktifitas kerja dengan aktifitas tersebut maka akan terjadi interaksi antara berbagai pihak, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Menurut (Supardi, dkk, 2002:43), ada dua hubungan yang terjadi dalam organisasi yaitu hubungan formal yang menimbulkan fomal organization dan hubungan informal organization. Hubungan formal adalah, hubungan yang terjadi antra anggota berdasarkan faktor yang ada. Sedangkan hubungan informal adalah hubungan antara anggota organisasi sebagai manusia.

#### **c. Organisasi sebagai sistim**

Organisasi sebagai sistim di dalamnya tercakup input, proses, organisasi sebagai sistim didalamnya input dan umpan balik (*feed back*). Input adalah masukan bagi organisasi untuk proses selanjutnya. Proses berupa interaksi antara personil dengan tugas dan tanggung

jawab masing masing dalam pencapaian tujuan organisasi yang merupakan *output* dari organisasi. Umpan balik berupa informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk perbaikan rencana program dan pengembangan organisasi selanjutnya. Menurut (Thoha, 2002:18) sebagai sistim, organisasi adalah sistim mengenai pekerjaan pekerjaan yang di rumuskan dengan baik dan masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah tugas, wewenang dan tanggung jawab tertentu keseluruhannya di susun secara sadar agar orang-orang dari badan usaha itu dapat bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan mereka.

Sebagai suatu sistim organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. (Hicks, dkk, 1975:22) menyatakan, bahwa organisasi merupakan kolektifitas manusia yang kompleks dan dituntun oleh tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (*impersonal*) ditandai oleh aktivitas kerjasama, terintegrasi dalam lingkungan yang lebih luas.

Organisasi ditinjau dari interaksinya dengan lingkungan dapat dibagi kedalam tiga model yaitu :

### 1) Model Sistim Tertutup (*Closed Model*)

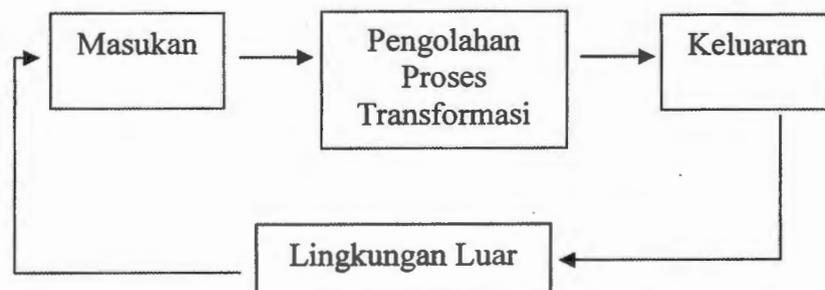
Salah satu contoh dari model ini adalah birokrasi, seperti yang di perkenalkan oleh Weber, yakni model yang dikenal dengan ideal *type of bureaucracy* (tipe ideal birokrasi) model ini menuntut adanya hierarki, promosi berdasarkan sistim dan keahlian, pengembangan karier dan penggunaan terhadap aturan - aturan dan

ketentuan ketentuan serta hubungan yang bersifat resmi, tidak memandang siapa orangnya . Organisasi sistim tertutup cenderung tidak berkembang di bandingkan dengan organisasi sistim terbuka. Hal tersebut di karenakan organisasi sangat sedikit menerima inovasi yang datang dari luar dan sistim organisasi cenderung menutup diri terhadap lingkungannya.

## 2) Model sistim terbuka (*open model*)

Contoh model sistim terbuka dapat di lihat dari model organisasi sebagai bagian dari lingkungan. Model menganggap organisasi sebagai bagian dari lingkungan. Model menganggap organisasi sebagai suatu unit yang menghadapi berbagai masalah yang datang dari lingkungan. Model ini sangat berkaitan erat dengan dunia organisasi publik. Organisasi dan lingkungan di pandang sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan. Organisasi dan lingkungan mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi senantiasa mengadakan penyesuaian.

Gambar.2.1  
Pola Dasar Sebuah Model Sistim Terbuka



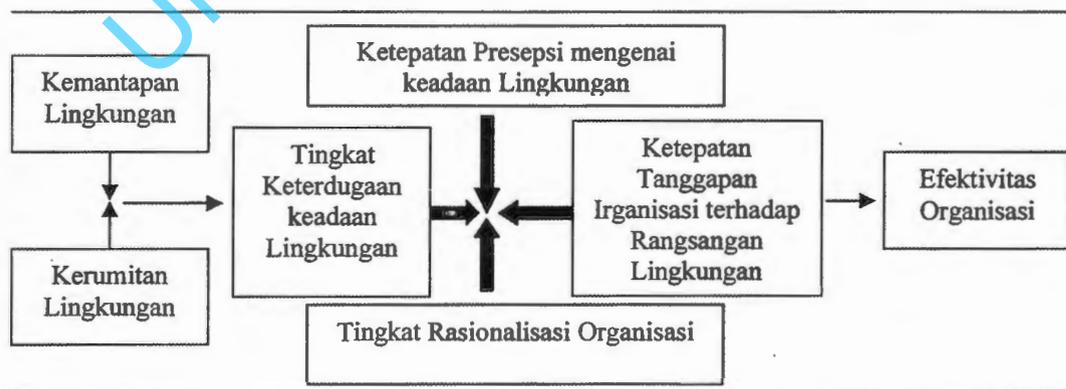
Sumber: Steer, (1985:48)

Sistim terbuka mencakup tiga komponen dasar: masukan, pengolahan dan keluaran. Masukan dipengaruhi oleh lingkungan *ekstern*, kemudian masukan diubah (diolah) menjadi bermacam-macam keluaran yang akan dikembalikan lagi kepada lingkungan (Steer, 1985:48)

### 3) Gabungan Antara Kedua Model Tersebut (*Syntesis Model*)

Gabungan model sistim tertutup dan sistim terbuka mengasumsikan bahwa organisasi dan lingkungan dapat benar-benar berubah, organisasi dan manusia di dalamnya dapat benar-benar belajar dari berbagai kesalahannya dengan kata lain organisasi dan orang didalamnya tetap berjuang untuk mengurangi ketidakpastian yang datang dari lingkungan dengan melakukan penyesuaian dan mengembangkan berbagai macam strategi dan teknik.

Gambar.2.2  
Hipotesis Pengaruh Lingkungan terhadap Efektivitas Organisasi



Sumber: Kasim (1993)

Disamping itu, Porter, Lawler, dan Hackman (Dalam Steer, 1985:60), mengemukakan bahwa organisasi yang efektif ditandai oleh 5 (lima) faktor pokok yaitu:

1. Komposisi;
2. Orientasi Tujuan (*Goal Orientation*);
3. Diferensial Fungsi;
4. Koordinasi Rasional dan;
5. Kontinuitas sepanjang waktu.

**d. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan.**

Tujuan perorangan akan sulit diwujudkan jika dilaksanakan sendirian, karena itu di butuhkan orang lain untuk saling bahu membahu menyelesaikannya, karena itu dibentuklah organisasi sebagai wadahnya. Organisasi dari sudut pandang ini merupakan alat untuk mengefektivkan, mengefisiensikan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan bersama. Karena itu di perlukan kesadaran dan tiap anggota organisasi dari tingkat terendah sampai manajer tertinggi tentang pengertian hakekat, pola dasar tujuan dan struktur organisasi. Mereka harus bahu membahu dalam menjalankan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Jika suatu organisasi tidak jelas tujuan-tujuannya atau punya tujuan ganda yang saling bertentangan, organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang tinggi (Osborne & Plastrik, 1997:45).

Begitu pula sebaliknya, jika suatu tugas atau tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan oleh lebih dari satu organisasi maka akan terjadi pemborosan, *ineffisiensi* dan mungkin persaingan tugas yang akan berdampak pada capaian efektivitas organisasi tersebut.

Gambar.2.3 Lima Strategi

<i>Pendongkrak</i>	<i>Strategi</i>	<i>Pendekatan</i>
Tujuan	Strategi Inti	Kejelasan Tujuan Kejelasan Peran Kejelasan Arah
Insentif	Strategi Konsekuensi	Persaingan Terkendali Manajemen Perusahaan Manajemen Kinerja
Pertanggung-jawaban	Strategi Pelanggan	Pilihan Pelanggan Pilihan Kompetitif Pemastian Mutu Pelanggan
Kekuasaan	Strategi Pengendalian	Organisasional Pemberdayaan Karyawan Pemberdayaan Masyarakat
Budaya	Strategi Budaya	Menghentikan Kebiasaan Menyentuh Perasaan Mengubah Pikiran

Sumber: Osborne dan Plastrik (1995)

Dari berbagai pengertian tentang organisasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah di mana sekelompok orang bekerjasama dengan sistim dan pola kerja tertentu dalam mencapai tujuan bersama.

## 2. Efektivitas Organisasi

Konsep efektivitas merupakan ukuran untuk menunjukkan keberhasilan kepemimpinan dan organisasi, tetapi sangat sulit untuk mendefinisikan konsep efektivitas itu sendiri. Karena ukuran keberhasilan kepemimpinan dan organisasi sangat relatif, tergantung bidang apa yang digeluti oleh organisasi tersebut. Karena itu dibutuhkan pendekatan tertentu untuk memahami konsep efektivitas organisasi tersebut.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas organisasi, digunakan 3 (tiga) paradigma yaitu pendekatan tujuan, pendekatan sistim dan pendekatan perilaku. Model pengukuran efektivitas dengan pendekatan tujuan

merupakan salah satu pendekatan tertua dan sudah di kenal secara umum dalam mengevaluasi efektivitas organisasi, seperti yang di kemukakan oleh Gibson, dkk (1996:63), bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu harus dievaluasi dari segi pencapaian tujuan telah diterima secara umum maupun secara luas. Pendekatan tujuan menunjukkan bahwa organisasi itu dibentuk dengan tujuan tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan tujuan mengakui bahwa organisasi yang berbeda mempunyai tujuan yang berbeda pula. Diakui pula bahwa organisasi berhadapan dengan berbagai keterbatasan sehingga tidak semua organisasi dapat memaksimalkan tujuan. Optimalisasi tujuan harus disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Jadi optimalisasi adalah sarana penyeimbang berbagai tujuan yang bertentangan. Disini konsep efektivitas di nilai dari tujuan yang bisa dilaksanakan , bukan pada optimalisasi tujuan organisasi (Steers, 1985:52 )

Pendekatan sistim di kemukakan di kemukakan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Gibsons (1996:58) yang mengemukakan bahwa organisasi adalah satu elemen yang berinteraksi secara interdependensi. Aliran masukan dan keluaran adalah dasar dari titik awal dalam menjelaskan organisasi, disini Gibson menjelaskan bahwa organisasi sebagai sistim selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan teori ini dapat dijelaskan perilaku organisasi baik internal maupun eksternal. Secara internal bisa dilihat dari bagaimana dan mengapa orang lain di dalam organisasi melaksanakan tugas individu mereka dan kelompok. Secara

eksternal, bisa di lihat pada transaksi organisasi dengan organisasi dan institusi lain. (Gibson, 1996:62) juga mengemukakan bahwa teori sistim menekankan pada dua pertimbangan penting yaitu ;

- a. Kelangsungan hidup yang paling penting bagi organisasi tergantung dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- b. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, siklus total dari masukan proses keluaran harus menjadi fokus perhatian manajerial.

Teori sistim mengisaratkan pentingnya umpan balik bagi organisasi, ketergantungan organisasi pada lingkungan luar, tidak hanya menyangkut masukan semata, tapi juga berkaitan dengan penerimaan *outputnya* oleh lingkungan. Dalam kaitan ini saluran informasi dalam organisasi memegang peran paling sentral. Senada dengan pendapat Gibson di atas, George Paulo dan Tanembaum (dalam Steers, 1985:58) berpendapat bahwa untuk memperoleh alasan-alasan teori itu sebaiknya konsep efektivitas organisasi di pandang dari sudut sistim itu sendiri, yaitu dari keseluruhan organisasi, dari sudut masyarakat yang lebih besar . Jadi efektivitas oraganisasi dikonsepskan sebagai berikut “Jangkauan usaha suatu organisasi sebagai suatu sistim sosial dengan sumberdaya dan sasaran tertentu dalam memenuhi sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumberdaya itu dan tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap anggota”. (French, dkk. 1995:30).

Efektivitas, kalau dipandang dari sudut pencapaian setoran semata akan selalu diukur berdasarkan prestasi, produktifitas, data dan seterusnya. Terdapat dua pandangan utama dalam menganalisis efektivitas organisasi.

#### 1. Ukuran-ukuran efektivitas yang Univariasi

Univariansi yang dimaksudkan disini menggambarkan tingkat produktifitas secara umum dipersamakan dengan efektivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah:

- a. Keseluruhan Prestasi;
- b. Produktifitas;
- c. Kepuasan Kerja Pegawai;
- d. Laba atau tingkat penghasilan dari penanaman modal;
- e. Keluarnya karyawan/perputaran.

## 2. Ukuran efektivitas yang Multivariansi

Penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah, sarana maupun tujuan-tujuan organisasi (Gorgopoulos dan Tannenbaum dalam Steer, 1985:56). Sebuah organisasi dalam jangka panjang akan memperlihatkan empat karakteristik utama yaitu:

- a. Pertumbuhan;
- b. Penyimpanan Energi;
- c. Kelangsungan Hidup;
- d. Pengendalian terhadap lingkungan luar.

Untuk menjamin kelangsungan hal di atas, sebagai suatu sistem terbuka, terdapat dua faktor dasar yang sangat penting artinya dalam penentuan efektivitas. Pertama, konsep efisiensi, kedua efektivitas politis yang didefinisikan sebagai usaha-usaha jangka pendek.

Dalam konsep multivariansi ini dikembangkan model yang menghubungkan berbagai kriteria evaluasi. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- Kemampuan adaptasi;
- Kepuasan;
- Daya Laba;
- Mendapatkan Sumber Daya;

- Ketiadaan Ketegangan / Tekanan;
- Pengendalian atas Lingkungan;
- Pengembangan;
- Efisiensi;
- Kebetahan Pekerja;
- Pertumbuhan;
- Komunikasi terbuka;
- Kelangsungan Hidup;
- Lain-lain Kriteria

Variabel dan kriteria-kriteria ini bersama-sama membentuk suatu keseluruhan yang utuh.

Pendekatan perilaku menekankan pada peran tingkah laku anggota organisasi terhadap keberhasilan organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan organisasi adalah melalui perilaku anggota organisasi.

Pelaksanaan pendekatan tujuan menurut Horizon dalam Gibson (1996:28) akan berhadapan dengan berbagai kesulitan antara lain :

- a. Pencapaian tujuan tidak dapat diukur pada organisasi yang tidak menghasilkan keluaran yang bersifat wujud (*tangible output*)
- b. Organisasi mencoba mencapai lebih dari satu tujuan, tetapi pencapaian satu tujuan kerap kali menghalangi atau mengurangi kemampuan mereka mencapai tujuan yang lain.
- c. Keberadaan tujuan resmi lazim di mana anggota menyatakan komitmen masih dipertanyakan. Beberapa peneliti telah memenuhi kesulitan memperoleh konsensus di antara manajer atas tujuan organisasi mereka.

Steers,(1985:32) mengemukakan bahwa pendekatan tujuan dalam menilai efektivitas organisasi terkadang menyebabkan kebingungan yang

di akibatkan pemberian arti yang berbeda kepada konsep tujuan. Artinya efektivitas tidak di nilai dari pencapaian tujuan tapi dari mengenali hambatan-hambatan pencapaian tujuan organisasi. Jika optimalisasi pencapaian tujuan membahayakan kelangsungan hidup organisasi, maka pendekatan tujuan tidak bisa di pakai sebagai ukuran dari efektivitas organisasi.

Menanggapi permasalahan di atas maka Steers (1985:4) mengemukakan alternatif terbaik untuk melakukan pendekatan terhadap efektivitas adalah dengan memakai ancangan berdimensi ganda yaitu memperhatikan secara bersama tiga konsep yang saling berhubungan yaitu:

- a. Pendekatan tujuan;
- b. Pendekatan sistem;
- c. Pendekatan perilaku.

Jadi jika ingin membahas efektivitas organisasi maka yang penting untuk dibahas adalah hubungan antara apa yang diinginkan anggota organisasi dengan apa yang di inginkan organisasi. Jika kedua rangkaian kebutuhan dan tujuan itu relatif *homogen*, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar (Steers, 1985, 10) ancangan terhadap efektivitas organisasi meliputi ketiga konsep di atas, dimana ketiga saling berhubungan. Sifat hubungan dilihat dari elemen-elemen yang saling mempengaruhi untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan organisasi yang mungkin atau layak dicapai.

Menurut Kasim (1993:vii;11), tinjauan literatur dalam membahas efektivitas organisasi dapat dilihat dari beberapa perspektif, beberapa model yang dapat dijadikan landasan dalam pembahasan efektivitas organisasi, adalah:

1. Model Tujuan Rasional (*Rational Goal Model*);
2. Model Hubungan Manusia (*Human Relation Model*);
3. Model Sistem Terbuka (*Open System Model*);
4. Model Proses Internal (*Internal Proses Model*).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa konsep efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang multidimensi artinya kajian efektivitas organisasi tidak hanya berhenti pada seberapa jauh organisasi mencapai tujuannya, tetapi perlu di lihat bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungannya apakah proses pencapaian tersebut menjamin kelangsungan organisasi, bagaimana organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya untuk mengoptimalkan hasil dan bagaimana perilaku organisasi terhadap anggotanya.

Tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Dengan demikian berbicara efektivitas organisasi terdapat dua aspek di dalamnya yaitu:

1. Tujuan organisasi;
2. Pelaksanaan fungsi /cara/alat untuk mencapai tujuan.

### 3. Efektivitas organisasi publik.

Sebagaimana telah di kemukakan terdahulu, bahwa pengertian efektivitas adalah proses pencapaian tujuan yang di inginkan melalui efektivitas-efektivitas yang dilakukan dengan benar kemudian di katakan pula bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu memecahkan permasalahannya sendiri serta mampu menunjukkan kualitas kerja yang tinggi. Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terwujudnya efektivitas dalam suatu organisasi akan sangat tergantung pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anggota itu sendiri, dengan demikian maka efektivitas kerja pegawai dalam organisasi akan sangat menentukan untuk terwujudnya organisasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Steers (1985:18) bahwa efektivitas itu sendiri paling baik dan dapat di mengerti jika dilihat dari sudut sejauhmana organisasi tersebut berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mengejar tujuan operasi dan tujuan operasional.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, efektivitas organisasi dapat ditinjau dari "*Rational Goal Model*". Model tujuan rasional ini didasarkan pada anggapan bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh pemilik organisasi yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang mempunyai hak atau legitimasi terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor publik, misalnya organisasi Pemerintahan yang menjadi pemiliknya adalah publik (masyarakat) terutama warganegara yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih (Kasim, 1993:13).

Dalam hal pelaksanaannya, tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi:

- Tujuan Resmi (*Official Goals*); dan
- Tujuan Operasional (*Operative Goals*).

Lebih lanjut, Kasim (1993:93), mengemukakan bahwa untuk mendiagnosa efektivitas organisasi digunakan pendekatan nilai-nilai yang bersaing (*Competing Value Approach*), dengan kata lain, efektivitas merupakan suatu hasil dari paradoks.

#### 4. Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur, misalnya tingkat kesejahteraan, agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur?

Pilihan kebijakan *bottom up planning* merupakan salah satu bentuk dari penekanan terhadap pelaksanaan terhadap azas desentralisasi pembangunan di samping mengurangi beban kerja Pemerintah pusat. Pilihan tersebut mengandung konsekuensi untuk di perbaikinya kemampuan aparatur Pemerintah di daerah dalam melaksanakan kegiatan kegiatannya. Tuntutan seperti ini terasa sekali dalam beberapa kegiatan pembangunan seperti program pengembangan wilayah provinsi yang menghendaki di lakukannya perencanaan oleh aparatur daerah sendiri. Seiring dengan dominannya kecenderungannya di dalam masyarakat dan atau Pemerintah untuk memilih desentralisasi dan termasuk debirokrasi

dalam mengelola Negara, persepsi kalangan teoritis berkembang wacana untuk menempatkan kualitas manusia sebagai sasaran pembangunan. Dengan ini pembangunan tidak hanya diartikan sebagai usaha menumbuhkan perekonomian melainkan juga peningkatan kapastian manusia untuk produksi, memperluas pemerataan, membagikan kekuasaan, menjamin kelangsungan sumber daya untuk berkembang, dan tumbuhnya kesadaran akan interpedensi (Effendi, 1989:43). Ada empat karakteristik sistim administrasi untuk pembangunan kualitas manusia ini, yaitu :

- a. Struktur bersifat organis adaptif (sebagai lawan mekanis statis);
- b. Prosedur dan proses lebih mengutamakan pencapaian hasil ketimbang pelaksanaan yang di atur ketat;
- c. Orientasi tidak pada status quo;
- d. Penciptaan lingkungan yang mendukung / partisipatif;

Empat karakteristik tersebut merupakan sifat dari desentralisasi oleh Frederikson (1984:15) dianggap sebagai tehnik untuk mempraktekkan dua buah nilai dalam administrasi "Negara Baru" yaitu daya tanggap yang terwujud sebagai partisipasi dan keadilan sosial yang terwujud sebagai keleluasan untuk melakukan perubahan perubahan.

Untuk merealisasikan kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia maka perencanaan diubah pembangunan yang *top-down* menjadi *bottom-up*. Terutama untuk proyek-proyek pedesaan dan *regional*. Rute yang di ikuti dalam proses ini berangkat dari tingkat akar rumput yaitu musyawarah dari

desa/kelurahan, musyawarah kecamatan, musyawarah Kabupaten, Provinsi dan selanjutnya secara nasional.

Pengembalian gerak pembangunan kepada masyarakat, walaupun sangat sedikit, mengubah peran Pemerintah daerah yang semula hanya sebagai penyambung kebijaksanaan Pemerintah pusat menjadi perencana dan pelaksana kebutuhan-kebutuhan daerahnya (Esmara,1986:42) Perubahan ini sesungguhnya sangat penting karena dengan pemberian peran yang lebih luas kepada daerah itulah rencana pembangunan lima tahunan sebagai penjabaran dari GBHN bisa di operasionalkan.

Pada tahap implementasi kebijaksanaan desentralisasi belum di lakukan secara memuaskan. Salah satu indikator yang dapat ditunjukkan adalah dari praktek otonomi daerah yang belum ideal. Pelaksanaan otonomi daerah senantiasa di kaitkan dengan realisasi penerahan urusan rumah tangga kepada daerah untuk di atur dan di urusnya sendiri.

Indikator lain dari masih lemahnya implementasi azas desentralisasi dapat dijumpai dalam hal perencanaan pembangunan daerah, misal masih adanya kekeliruan yang mendasar di dalam mengembangkan *logical frame work* yang tidak jelas antara beberapa tingkat perencanaan dan hampir tidak dilakukan revisi terhadap rencana tahunan padahal kondisi lingkungan sudah mengalami perubahan, akibatnya "*target group*" mengalami kejenuhan dalam menerima dan melaksanakan program-program pembangunan (Nasikun, 1988:20).

Kelemahan lain yang bisa ditunjuk dari usaha implementasi desentralisasi adalah: sering gagalnya proyek pembangunan suatu instansi di daerah karena tidak didukung oleh perencanaan proyek dari instansi lain (Syafriзал, 1985:40)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terbangkitkan (Effendi, 1989: ) Program-program pembangunan mengalami *urban bias*, kendornya *self reliance* dan masih kuatnya sikap dan tindakan ketergantungan Pemerintah daerah kepada Pemerintah pusat. Kesemuanya menunjukkan belum optimalnya kepala daerah beserta stafnya terutama Bappeda dan Statistik dalam memainkan perencanaan daerah.

*Mind Set* yang terbangun dalam diri birokrasi daerah tercipta kebiasaan untuk berhasil memperjuangkan dana dari Pemerintah pusat dan bukannya untuk berparadigma atau berkonsep dan berstrategi (Slamet, 1989:61). Padahal keberhasilan manajemen dalam skala besar maupun kecil menjadi tanggung jawab dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam proses itu, yang seharusnya bersifat inovatif dan strategis, serta terkait untuk membuat perluasan kebijaksanaan dan tujuan tujuan baru (Lewis, 1986:83)

Oleh karena itu, kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah perlu lebih disempurnakan. Perumusan alternatif-alternatif kebijaksanaan tentang badan perencanaan ini sangat membantu upaya peningkatan otonomi daerah.

Adapun keberhasilan suatu Badan Perencanaan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya di pengaruhi oleh fator internal dan faktor eksternal di tubuh badan perencana. Faktor internal meliputi :

- a. Tingkat profesionalisme;
- b. Disiplin kerja;
- c. Gaya kepemimpinan;
- d. Kualitas prasarana;
- e. Struktur organisasi;

Sedangkan faktor eksternal meliputi: tingkat kerjasama atau dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi lainnya.

## B. Kerangka Berpikir.

Berdasarkan kajian teori dan maksud penelitian sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dijelaskan, bahwa pendekatan terhadap tujuan organisasi sebagai upaya untuk melihat efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilakukan melalui penelaahan mekanisme perencanaan dan ketersediaan dokumen yang dihasilkan serta *benefit* yang dirasakan masyarakat akibat pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang juga merupakan suatu organisasi publik, Bappeda dan Statistik bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah yang harus memenuhi unsur-unsur holistik, terpadu, komprehensif, lintas sektor dan lintas wilayah. Perencanaan dimaksud, dikaitkan dengan *rational goal model* dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator generik sebagaimana berikut ini:

### 1. Terakomodirnya usulan masyarakat dari bawah (*bottom up planning*)

Perencanaan dari bawah dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Perencanaan dari bawah dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta

masyarakat. Pelibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sesuai aturan yang berlaku, terdapat beberapa mekanisme untuk menampung aspirasi masyarakat antara lain melalui, forum rembung desa, “jaring asmara” (penjaringan aspirasi masyarakat) dan reses Anggota DPRD dimana biasanya pada masa reses, Anggota DPR maupun DPRD akan menampung aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen mereka.

Selanjutnya pendekatan dari bawah akan diselaraskan dengan pendekatan dari atas (*top down*) melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Terlepas dari proses dan tahapan penyusunan rencana pembangunan, masih banyak usulan masyarakat dari bawah yang merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat tidak dapat diakomodir di dalam rencana pembangunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran serta adanya prioritas-prioritas pembangunan lain yang telah dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspirasi dan keinginan masyarakat ini belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam bentuk program/ kegiatan, karena terkadang terbentur oleh identifikasi SKPD terkait, sehingga sulit dimasukkan kedalam prioritas pembangunan. Selain itu juga terkadang terkendala oleh berlakunya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupate/Kota.

## 2. Rencana yang disusun bersifat aplikatif

Rencana yang disusun hendaknya bersifat aplikatif dan realistis atau dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat serta memiliki kesesuaian antara rancana, pelaksanaan dan output yang diharapkan. Realitasnya, sebagian rencana tidak atau belum dapat diaplikasikan karena terbentur dengan kondisi alam (iklim, keadaan social, keadaan geografis, dsb.) serta persyaratan-persyaratan teknis maupun karena kendala ketersediaan sumber daya manusia pengelolanya di SKPD. Fenomena yang sering terjadi adalah adanya SKPD ataupun juga Kabupaten/Kota yang merencanakan kegiatan hanya secara sektoral (ego-sektoral semata-mata), tanpa melihat kepentingan-kepentingan lain yang lebih tepat. Hal ini mengakibatkan rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan walaupun terlaksana akan tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan citra buruk bagi Pemerintah.

## 3. Rencana yang dilaksanakan memiliki manfaat

Selain aplikatif, rencana yang disusun hendaknya memberikan manfaat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dan manfaat tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di lain pihak efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan konsep "*Rational Goal Model*" berarti efektivitas organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh organisasi tersebut mencapai tujuan rasionalnya, terutama tujuan yang bersifat resmi "*Official Goal*" sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan, bahwa struktur organisasi, proses perencanaan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana efektivitas organisasi Bappeda dan Statistik ditinjau dari “*Rational Goal Model*”.

Dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa, organisasi Bappeda dan Statistik sudah dikatakan efektif apabila:

- Usulan masyarakat yang disampaikan lewat beberapa mekanisme seperti rembug desa, penjangkaran aspirasi masyarakat dan reses Anggota DPRD sudah mampu diakomodir;
- Rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan yang dihasilkan bersifat aplikatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- Hasil pelaksanaan dari rencana pembangunan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan terdapat kesesuaian antara rencana, aplikasi dan keluaran;

Selain fungsi perencanaan Bappeda juga memiliki fungsi pengendalian pembangunan. Implementasi pelaksanaan pengendalian pembangunan menjadi instrument penting didalam melihat sejauh mana rencana yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditentukan serta

untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dari suatu pelaksanaan program kegiatan.

Untuk menggambarkan tugas umum yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat disajikan beberapa indikator efektivitas Bappeda dan Statistik sesuai dengan *rational, goal model* sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

Universitas Terbuka

Tabel 2.1 Indikator Efektivitas Organisasi

Standard	Realisasi
<b>I. MEKANISME PERENCANAAN</b>	
I.1 Politik	Terealisasi, sudah ada PERDA tentang RPJP dan RPJMD
I.2 Teknokratik	Melalui usulan SKPD dan usulan Kabupaten/Kota
I.3 Partisipatif	Didapatkan melalui jaring Asmara, metode PRA
I.4 Atas-bawah	Musrenbangnas dan Rakorpus Bappenas untuk penyesuaian antara RPJMD dan RPJM Nasional
I.5 Bawah-atas	Melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan
I.6 Musrenbang	Terlaksana sesuai undang-undang No.25 Tahun 2004
I.7 Forum SKPD	Usulan masing-masing Satker disesuaikan dengan dokumen Renstra SKPD
I.8 Reses DPRD	Belum sesuai dengan waktu Musrenbang
<b>II. DOKUMEN PERENCANAAN</b>	
II.1 RPJPD	Sudah tersedia untuk kurun waktu 2000-2020
II.2 RPJMD	Sudah tersedia untuk kurun waktu 2007-2012
II.3 RKPd	Penjabaran RPJMD berlaku di setiap Tahun Anggaran
II.4 Renstra SKPD	Belum aplikatif dan belum lengkap
II.5 KUA & PPAS	Sudah tersedia dan sebagai dasar penyusunan RAPBD
<b>III. PENGENDALIAN</b>	
III.1 Monitoring	Dilaksanakan untuk melihat realisasi pelaksanaan perencanaan program
III.2 Evaluasi	Terealisasi namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar perencanaan tahun selanjutnya. Data yang didapat baru sebatas persentase (input-output proses)
<b>IV. PENDUKUNG</b>	
Basis Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kerjasama Dengan BPS menghasilkan data:</b> Bangka Belitung Dalam Angka (BBDA), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai macam hasil kajian</li> <li>- <b>Kerjasama dengan BAKOSURTANAL:</b> Data spasial dan koordinat, rencana tata ruang, maping wil. Kemiskinan, dsb.</li> </ul>

### C. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

2. Tujuan organisasi *Rational Goal Model*, merupakan suatu kewajiban tugas suatu organisasi. Karena pada dasarnya organisasi dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk untuk melakukan tugas-tugas koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan baik lintas sektor maupun lintas wilayah. Keterpaduan antara rencana pembangunan sektoral dan rencana pembangunan spasial mesti tergambar dengan jelas dan tidak saling bertentangan. Artinya antara RPJP atau RPJMD yang pada dasarnya merupakan Perencanaan Pembangunan Sektoral, mesti betul-betul terpadu dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang merupakan suatu *Blue Print* perencanaan Pembangunan Spasial.
3. Struktur organisasi adalah bentuk dan susunan serta hierarki dari suatu organisasi publik. Susunan organisasi berimplikasi pada penjabaran tugas (*Job Description*) dan rekrutmen pegawai. Selain itu struktur organisasi juga berdampak pada penyesuaian jumlah pegawai dan struktur organisasi harus disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi;
4. Proses perencanaan adalah suatu tahapan yang harus dilakukan dalam rangka untuk penyusunan rencana pembangunan. Proses perencanaan diharapkan bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;

5. Dokumen perencanaan adalah suatu bentuk dokumentasi dari hasil proses perencanaan yang telah dilakukan. Dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda dan Statistik berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diharapkan bersifat aplikatif atau sesuatu yang bias dilaksanakan dan menjadi kebutuhan masyarakat.
6. Pendekatan Politik merupakan suatu pendekatan yang memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
7. Pendekatan Teknokratik adalah suatu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
8. Pendekatan Partisipatif merupakan suatu pendekatan perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
9. Pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

10. Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
11. Forum SKPD adalah suatu wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait
12. Masa reses adalah masa perhentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang, dan biasanya dimanfaatkan untuk turun ke daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi masyarakat terutama yang menjadi konstituennya
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Menurut Newman (2007:11), terdapat 3 (tiga) pendekatan utama dalam penelitian-penelitian sosial, yaitu: Pendekatan Positifisme (*Positivist Approach*), Pendekatan Interpretatif (*Interperative Approach*), dan Pendekatan Kritis (*Critical Approach*). Sebagian besar penelitian positivist adalah kuantitatif dan pada umumnya melihat percobaan sebagai cara yang ideal untuk melakukan penelitian. Para peneliti positivist juga menggunakan teknik-teknik penelitian kuantitatif lainnya, seperti survey atau statistik. Pengulangan dan replikasi sangat penting dalam penelitian positivist. Menurut Myers (3 September 2010: <http://www.qual.auckland.ac.nz>), pendekatan positivisme biasa juga dilakukan pada penelitian kualitatif.

Penilaian efektivitas organisasi pada Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikaitkan dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan, serta merujuk kepada kerangka berpikir efektivitas organisasi maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan positivisme (*positivist approach*).

Positivist menempatkan nilai besar pada prinsip replikasi, bahkan jika hanya sedikit studi yang di replikasi. Replikasi terjadi dengan cara mengulangi dasar-dasar studi/wawancara dan mendapatkan hal yang identik atau temuan yang mirip. Positivist dapat menggunakan penyelidikan induktif dan deduktif, tapi idealnya adalah untuk mengembangkan hukum kausal umum atau deduksi logis untuk menentukan faktor-faktor yang diteliti dalam suasana konkrit.

Teknik pengumpulan data adalah teknik kualitatif yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan ini juga disebut pendekatan naturalistik (Nasution, 1996:5). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) menjelaskan bahwa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Bappeda dan Statistik, anggota DPRD Provinsi dan mitra kerja Bappeda dan Statistik sedangkan metode pengambilan sampel penelitian adalah menggunakan *purposive sampling*, dimana dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut (Soeratno dan Arsyad, 1988:119). Dalam penelitian ini, yang menjadi ciri-ciri khusus dari sampel adalah dimana sampel tersebut memiliki hubungan kerja secara langsung dengan objek penelitian sedangkan didalam penetapan orang-orang yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *key person*.

Penetapan informan melalui *key person* dapat digunakan apabila peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek penelitian dan informan penelitian. *Key person* dalam penelitian ini adalah tokoh *formal* dan tokoh *informal*. Tokoh *formal* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada didalam lingkungan Bappeda dan Statistik yang terdiri dari Sekretaris Bappeda dan Statistik, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan staf, sedangkan tokoh *informal* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh yang berada diluar objek penelitian namun dianggap memahami tentang objek penelitian dimaksud. Dalam penelitian ini yang menjadi tokoh *informal* adalah Anggota

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan SKPD yang menjadi mitra kerja Bappeda dan Statistik.

Tokoh informal dalam penelitian ini sangat dibutuhkan karena penelitian ini selain ditekankan pada *Rational Goal Model* juga keterkaitannya dengan Model Sistem Terbuka, yang dikaitkan dengan struktur organisasi. Sebagai salah satu lembaga publik, tokoh informal dianggap akan mewarnai juga aktivitas organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam studi kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pendapat, persepsi, penerimaan atau kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan yang telah ada (evaluatif) atau program pelayanan yang akan dijalankan. Wawancara mendalam juga dapat digunakan untuk menelusuri berbagai hal yang diperkirakan sebagai faktor yang berkaitan dengan timbulnya hal-hal atau suatu fenomena yang belum pernah ada.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang telah di siapkan terlebih dahulu. Data bersumber dari Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Staff sebanyak 10 orang, Organisasi diluar Bappeda dan Statistik., Tokoh Masyarakat dan Pelanggan sebanyak 5 orang. Informan/Narasumber dimaksud adalah:

- a. Sekretaris Bappeda;
- b. Kepala Bidang;

- c. Kepala Sub Bidang;
- d. Staff Bappeda dan Statistik;
- e. Organisasi Mitra (*Share Holder*);
- f. Tokoh Masyarakat;
- g. Pelanggan (*Customer*);
- h. Lembaga Legislatif (*Stake Holder*)

## 2. Dokumentasi

Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga menggunakan instrument penelitian lainnya, yaitu dokumentasi. Dimana dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, pencermatan dimulai dengan penelaahan dokumen RPJPD, RPJMD, Proses & Dokumen Musrenbang, serta RKPD, yang merupakan dokumen wajib dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, studi dilanjutkan pula dengan menelaah dokumen pendukung, seperti Bangka Belitung Dalam Angka, Dokumen Monitoring dan Evaluasi, Risalah-risalah rapat dan produk-produk yang berkaitan dengan tujuan operasional (*Operative Goal*).

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi ;

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber/informan. Data ini berupa pendapat pegawai Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung serta pelanggan yang pernah berhubungan dengan Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

- b. Data Sekunder, Yaitu data yang di peroleh dalam keadaan sudah di olah, seperti dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan kerja Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis dan pengolahan data bersifat kualitatif dilakukan sesuai dengan persepsi para informan/narasumber, yaitu menggambarkan atau menguraikan tentang objek penelitian dan membandingkan hasilnya dengan teori yang digunakan. Data yang dianalisis tersebut terdiri dari data primer dan skunder yang diperoleh dari wawancara dan telaahan dokumen.

Data hasil wawancara, kemudian diolah, dipadukan dengan telaahan dokumentasi, dan akan disajikan dalam bentuk verbatim dan isu-isu pokok yang terungkap. Sedangkan dokumen wawancara secara lengkap akan dilampirkan sebagai bukti otentik penelitian ini.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Sebelum dilakukan pengolahan data, data tersebut diperiksa lebih dahulu.

Jadi dalam penelitian ini jawaban dari informan yang dikumpulkan melalui

metode wawancara yang selanjutnya diterjemahkan didalam tulisan dilakukan proses editing dalam rangka meneliti kembali jawaban informan.

## 2. Melakukan klasifikasi data,

Klasifikasi terhadap data yang sudah diedit dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan mengklasifikasikan data berdasarkan substansi dan struktur jawaban dari informan. Klasifikasi data didalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata.

Pada penelitian ini klasifikasi data dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan pada saat wawancara. Data yang nantinya akan disajikan didalam pembahasan akan dikelompokkan menjadi sub-sub topik bahasan.

## 3. Analisis Data

Menurut Neuman, (2007:119), analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Menurut Patton, 1980 (dalam Moleong, 2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Menurut Wimmer & Dominick (2000:32) analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan salah satu dari Metode Analisis Teks dan Bahasa, yaitu Analisis Isi (*Content Analysis*). Menurut Bungin (2009:155), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan erat dengan komunikasi yang selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya, baik berupa verbal maupun non verbal.

Terdapat empat macam prinsip analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Prinsip Sistematis, bahwa ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis.
- b. Prinsip Obyektif, hasilnya tergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya.
- c. Prinsip Kualitatif, menilai atau memaknai hasil wawancara untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan.

- d. Isi yang nyata, yang diteliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh si peneliti.

#### 4. Uji keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji:

a. *Credibility* (validitas internal)

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

- 1) Perpanjangan pengamatan;
- 2) Peningkatkan ketekunan dalam penelitian;
- 3) Triangulasi;
- 4) Diskusi dengan teman sejawat;
- 5) Analisis kasus negative, dan

6) *Membercheck*.

b. *Transferability* (validitas eksternal)

Menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin "*validitas eksternal*" ini.

c. *Dependability* (reliabilitas),

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliabel* atau *dependable*.

d. *Confirmability* (obyektivitas).

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

Selanjutnya, dalam rangka melakukan uji keabsahan hasil penelitian maka digunakan uji *Credibility (validitas internal)* dengan menggunakan teknik triangulasi.

Universitas Terbuka

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh narasumber/informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan narasumber/informan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan didalam bab terdahulu, diutarakan bahwa dalam melihat efektifitas dan keberadaan organisasi Bappeda dan Statistik dapat ditinjau melalui beberapa aspek yaitu, struktur organisasi, proses perencanaan dan sejauh mana dokumen perencanaan yang ada mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Untuk dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara kualitatif sehingga tergambar secara jelas hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka analisis

dibagi sesuai tinjauan aspek-aspek yang digunakan sebagaimana tersebut di atas.

Pada saat dilakukan penelitian di lapangan, peneliti berupaya untuk memperoleh data baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Pada bab ini, data-data tersebut dideskripsikan dan dipergunakan untuk dianalisis guna menjawab permasalahan yang tertera pada Bab I sebelumnya.

### **1. Struktur Organisasi Bappeda dan Statistik**

Bappeda merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Serta memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- 2) Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting terutama didalam penjabaran fungsi dari struktur yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sejak diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah yang selanjutnya di interpretasikan didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5, 6, 7 Tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka saat ini struktur di Bappeda dan Statistik yang semula memiliki 1 struktur pejabat eselon II, 6 struktur pejabat eselon III dan 15 struktur pejabat eselon IV menjadi 1 struktur pejabat eselon II, 5 struktur pejabat eselon III dan 11 struktur pejabat eselon IV.

Sejauh ini belum pernah dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi kebijakan struktur yang baru tersebut meskipun telah memasuki tahun ketiga didalam implementasinya.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi dari Informan/narasumber penelitian yang terkait dengan struktur organisasi yaitu berupa kesesuaian struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini, efektifitas struktur organisasi, faktor-faktor yang dianggap penting jika suatu saat struktur organisasi Bappeda dan Statistik mengalami perubahan dan kriteria utama yang harus ada di lingkungan organisasi Bappeda dan Statistik. (Struktur Organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Lampiran 2)

Berikut disajikan informasi yang dihimpun oleh peneliti dari seluruh Informan/narasumber terhadap aspek struktur organisasi Bappeda dan Statistik:

a. Sekretaris Bappeda dan Statistik mengemukakan,

"Struktur Bappeda dan Statistik saat ini belum sesuai, seharusnya ada suatu bidang yang melaksanakan pengembangan SDA mengingat karakteristik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap SDA".

Selanjutnya mengenai efektifitas organisasi saat ini dinyatakan

“Jika tolak ukur efektif adalah kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka saya menganggap struktur yang ada sudah cukup efektif”.

Untuk faktor-faktor yang dianggap penting jika suatu saat struktur organisasi Bappeda dan Statistik mengalami perubahan, Narasumber mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Yang harus menjadi pertimbangan adalah ketergantungan Bangka Belitung terhadap SDA baik yang bersifat terbaharukan maupun yang non terbaharukan, sehingga diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dapat lebih optimal”.

Sedangkan ketika berbicara mengenai kriteria utama yang harus ada di lingkungan organisasi Bappeda dan Statistik, dinyatakan:

“Pegawai-pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian lintas sektoral”

b. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Statistik menyatakan:

“Struktur organisasi sudah sesuai jika ditinjau dari sisi fungsi Bappeda dan Statistik sebagai koordinator SKPD dalam hal perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, artinya bidang-bidang yang ada di Bappeda dan Statistik sudah cukup mampu mengkoordinir SKPD di lingkungan Pemprov. Kep. Babel dalam hal perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, namun ditinjau dari sisi fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Statistik masih banyak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang Bappeda dan Statistik dengan SKPD/Lembaga lain. Misalnya, berdasarkan PP 41 Tahun 2007, nomenklatur yang semula Bappeda menjadi Bappeda dan Statistik, namun tugas dan kewenangan dalam mengelola data-data statistik sampai dengan saat ini masih menjadi tugas dan kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi yang artinya data-data yang diolah oleh Bappeda dan Statistik tidak akan diakui validitasnya”

Lebih lanjut mengenai efektifitas organisasi saat ini, dikemukakan

“Berbicara efektifitas tentu harus diketahui indikator keberhasilan atau target kinerja yang hendak dicapai dan juga harus membandingkan indikator tersebut antara sebelum dan sesudah struktur tersebut dirubah. Jika indikator yang digunakan adalah ketepatan/kesesuaian antara program yang dilaksanakan terhadap dokumen perencanaan yang ada (RPJMD dan Renstra) maka struktur Bappeda dan Statistik saat ini sudah dirasakan sudah efektif karena ada trend peningkatan dari indikator tersebut setiap tahunnya”.

Untuk faktor-faktor yang dianggap penting jika suatu saat struktur organisasi Bappeda dan Statistik mengalami perubahan, dinyatakan:

“Jika Balitbangda belum juga dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sebaiknya tugas penelitian dan pengembangan dapat diakomodir menjadi satu bidang tersendiri dan tidak melekat lagi pada Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Statistik seperti saat ini. Mengingat Bidang Litbang ini nantinya diharapkan mampu menghasilkan kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang hasilnya akan bermanfaat bagi perencanaan yang ditinjau dari sisi akademis”.

Sedangkan ketika berbicara mengenai kriteria utama yang harus ada di lingkungan organisasi Bappeda dan Statistik, Narasumber menyatakan:

“Dalam suatu proses perencanaan tentu saja dibutuhkan suatu kajian secara akademis untuk melihat apakah suatu kegiatan yang akan direncanakan benar-benar memiliki manfaat bagi pembangunan. Dalam hal ini kajian tersebut dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, namun karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki Badan tersebut maka tugas pokok dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu bidang baru yang khusus melakukan kajian-kajian akademis. Atau jika SDM-nya tersedia maka jabatan fungsional perencanaan yang ada di Bappeda dan Statistik dapat dihidupkan”.

- c. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik pada Bappeda dan Statistik mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Struktur belum sesuai jika indikator yang digunakan adalah menyangkut tugas pokok dan fungsi, sebagai contoh nomenklatur statistik yang melekat ternyata tidak disertai fungsi sebagai pengolah data statistik, kemudian untuk fungsi penelitian, sampai saat ini belum adanya SDM yang memiliki basis peneliti membuat nomenklatur tersebut hanya seperti sebuah nama tanpa fungsi. Sebaiknya dilakukan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian di bidang penelitian atau dibentuk bidang khusus yang menangani masalah penelitian atau jika memang dianggap tidak efektif dapat dibuang saja fungsi penelitian yang ada pada Bappeda. Selain itu, hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang selama ini dilaksanakan belum dijadikan sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan di tahun-tahun berikutnya”.

Mengenai efektifitas organisasi Bappeda dan Statistik saat ini, Narasumber menyatakan:

“Jika indikator efektif adalah kinerja, maka jawabannya adalah efektif. Artinya semua yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dapat dikerjakan dengan baik, tepat waktu dan tertib administrasi”. Lebih lanjut ketika dipertanyakan mengenai faktor-faktor yang dianggap penting jika suatu saat struktur organisasi Bappeda dan Statistik mengalami perubahan, dijawab:

“Faktor karakteristik sebagai wilayah dengan luas lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Mungkin diperlukan satu bidang khusus yang menangani masalah kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Sedangkan mengenai kriteria utama yang harus ada di lingkungan organisasi Bappeda dan Statistik, dinyatakan:

“SDM harus memiliki kemampuan secara akademis untuk melakukan suatu kajian yang bermanfaat sebagai bahan bagi perencanaan program pembangunan”.

d. Kepala Bidang Sosbud Bappeda dan Statistik menyatakan bahwa:

“Struktur sudah sesuai. Tapi tetap perlu dilakukan penguatan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan. Namun secara

tugas pokok dan fungsi, masih banyak tugas koordinasi yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan inefisiensi, misalkan yang terjadi di bidang Sosbud, kegiatan PNPM yang dilaksanakan oleh SKPD lain namun dalam hal tertentu Bappeda dan Statistik ditunjuk selaku ketua di dalam kegiatan tersebut”.

Mengenai efektifitas saat ini, dinyatakan:

“Ya. Pasca dilaksanakannya PP 41 Tahun 2007 terjadi efisiensi pada tingkatan jabatan struktural namun telah diantisipasi dengan penguatan pada tingkatan staff sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan dan koordinasi berdasarkan eselonering semakin mudah dilakukan”.

Lebih lanjut, berbicara mengenai faktor-faktor yang dianggap penting jika suatu saat struktur organisasi Bappeda dan Statistik mengalami perubahan, Narasumber menyatakan:

“Jika harus dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi saat ini, jika memungkinkan perlu diadakannya jabatan Wakil Kepala Bappeda dengan yang setingkat eselon IIB, mengingat aktivitas dan mobilitas Kepala Bappeda dan Statistik yang sangat tinggi, diharapkan Wakil Kepala Bappeda mampu menggantikan peran dan fungsi Kepala Bappeda selama Kepala bappeda melaksanakan tugas diluar kantor, dengan tingkat eselon yang berada diatas kepala bidang diharapkan Wakil Kepala Bappeda nantinya akan mampu mengkoordinir kepala bidang yang ada dan kepala bidang harus melaksanakan perintahnya mengingat level eselon yang lebih tinggi”.

Sedangkan pada saat berbicara mengenai kriteria utama yang harus ada di lingkungan organisasi Bappeda dan Statistik, dinyatakan:

“Seluruh pegawai Bappeda diharuskan memiliki sertifikasi perencanaan atau minimal pernah mengikuti pelatihan-pelatihan perencanaan sehingga diharapkan mampu mengarahkan pembangunan menjadi lebih baik”.

e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan Statistik,

berpendapat mengenai struktur organisasi Bappeda saat ini:

“Secara struktural sudah sesuai, namun masih banyak tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bappeda tumpang tindih dengan SKPD lain, sebagai contoh pada Bidang Fisra, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya fungsi tugas yang berkenaan dengan tata ruang berada di Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Tata Ruang sebagaimana di tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang, namun yang terjadi saat ini, fungsi yang terkait dengan tata ruang masih banyak dilakukan oleh Bappeda dan Statistik”.

“Struktur Bappeda juga saat ini sudah lebih menjadi efektif dan efisien tentunya, artinya jika dulu hampir setiap bidang yang ada pada Bappeda terdiri dari 3 sub semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan ternyata saat ini meskipun hampir setiap bidang hanya memiliki 2 sub bidang namun tidak berdampak pada penurunan kinerja Bappeda, tentu saja indikator yang digunakan adalah realisasi serapan anggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya”.

“Jika harus dilakukan perubahan maka harus adanya satu bidang yang khusus melakukan kajian-kajian terhadap program kegiatan yang akan direncanakan maupun kajian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Tentu saja harus disiapkan dulu SDM yang memiliki kompetensi untuk hal tersebut, dapat dilakukan pelatihan atau rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan untuk jabatan fungsional tersebut”.

“Kriteria utama yang harus ada pada lembaga perencanaan menurut saya adalah adanya suatu jabatan fungsional”.

f. Ka.Sub.Bid. Tata Ruang Bidang fisra Bappeda dan Statistik,

mengemukakan pendapatnya yang berkenaan dengan struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini:

“Struktur sudah sesuai namun memiliki kelemahan dimana saat ini Bappeda dan Statistik hanya terdiri dari pejabat struktural yang setiap saat dapat dipindahkan”.

“Ya, struktur saat ini menjadi lebih efektif. Lebih mudah dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pejabat eselon secara hierarki”.

“Jika harus dilakukan perubahan pada struktur Bappeda dan Statistik maka yang harus menjadi pertimbangan adalah Beban kerja, maksudnya tidak dapat disamaratakan disetiap bidang memiliki 2 sub bidang tapi lebih kepada melihat jumlah mitra (*counterpart*)

yang dikoordinir oleh bidang tersebut. Misal; bidang fisra dengan jumlah mitra sebanyak 3 SKPD memiliki 2 sub bidang dan bidang ekonomi dengan jumlah mitra sebanyak 12 SKPD yang juga memiliki 2 sub bidang”.

“Kriteria yang harus ada yaitu adanya fungsi penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing”.

- g. Kasub.Bag.Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Statistik, berpendapat:

“Struktur organisasi sudah sesuai dan sudah efektif”

“Faktor yang harus mendapat perhatian jika struktur organisasi dilakukan perubahan adalah faktor pengembangan kewilayahan mengingat kondisi geografis dengan jumlah pulau yang banyak dan tersebar, mungkin dibutuhkan satu bidang khusus seperti bidang pengkajian dan pengembangan prasarana wilayah khususnya pulau-pulau kecil”.

“Kriteria yang harus ada yaitu, adanya jabatan fungsional perencana”.

- h. Ka.Sub.Bag. Penyusunan Perencanaan Bappeda dan Statistik, berpendapat:

“Struktur organisasi sudah sesuai dan sudah efektif dengan berbagai indikator capaian kinerja seperti kesesuaian program pembangunan terhadap dokumen perencanaan yang ada menunjukkan peningkatan, indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang semakin baik dan capaian terhadap realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan oleh Bappeda menunjukkan peningkatan setiap tahunnya”.

“Faktor-faktor yang harus diperhatikan jika struktur mengalami perubahan yaitu pengaturan kembali tugas pokok dan fungsinya saja. Beberapa fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang selama ini masih tumpangtindih dengan urusan yang dilaksanakan SKPD lain, seperti fungsi statistik, fungsi monitoring evaluasi dan fungsi tata ruang”.

“Kriteria yang harus ada pada Bappeda dan Statistik adalah harus menjadi Lembaga yang mampu memberikan gambaran obyektif mengenai perkembangan yang terjadi atau pun mungkin terjadi dan tawaran langkah-langkah yang lebih pasti ke arah pemantapan pemulihan ekonomi dan terselenggaranya kembali pembangunan daerah di seluruh sektor, kawasan, dan wilayah”.

i. Staf Sub.Bid Tata Ruang Bidang Fisra Bappeda dan Statistik

mengemukakan pendapatnya:

“Struktur saat ini belum sesuai jika melihat jumlah counterpart (mitra) masing-masing bidang. Setiap bidang memiliki 2 sub-bidang tidak didasari oleh jumlah counterpart yang menjadi mitra pada masing-masing bidang”.

“Struktur sudah efektif dan efisien, dengan asumsi semua pekerjaan tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun secara struktural terdapat reorganisasi berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007”.

“Yang harus dipertimbangkan jika struktur mengalami perubahan adalah jumlah *counterpart* (mitra) pada masing-masing bidang, untuk bidang yang memiliki counterpart banyak dimungkinkan mempunyai sub-bidang yang lebih banyak”.

“Yang harus ada pada lembaga perencanaan menurut saya, SDM yang ada harus memiliki kemampuan baik akademis maupun teknis yang berkenaan dengan perencanaan”.

j. Ka.Sub. Bag Perencanaan dan Pusat Data Dinas Komunikasi dan

Informatika mengemukakan pendapatnya:

“Struktur belum sesuai. Maksudnya struktur yang ada saat ini belum diikuti oleh pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur itu sendiri. Misalnya, pada bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik, sampai saat ini fungsi penelitian dan statistik belum dilaksanakan secara optimal”

“Struktur sudah efektif, dengan indikator pelaksanaan tugas dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda dengan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tapi bisa juga menjadi tidak efektif jika melihat masih banyaknya fungsi yang tidak berjalan dengan baik di Bappeda dan Statistik”.

“Beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan seandainya dilakukan perubahan pada struktur organisasi, yaitu terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang selama ini masih tumpang tindih dan tidak optimal dilaksanakan sebaiknya dikaji ulang, apakah fungsi tersebut akan dioptimalkan atau dieliminir dari fungsi Bappeda dan Statistik, sebagai contoh, fungsi statistik dan fungsi penelitian. Khusus untuk fungsi statistik sebaiknya dihilangkan saja karena fungsi statistik sudah melekat di BPS sedangkan fungsi penelitian jika ingin dioptimalkan sebaiknya dijadikan satu bidang yaitu bidang penelitian

dan pengembangan yang tentu saja pembentukan bidang ini harus disertai dengan tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian”.

“Yang harus ada pada lembaga perencanaan seperti Bappeda atau Bappenas adalah, harus memiliki kelompok jabatan fungsional perencana dan bidang litbang”.

k. Kepala Seksi Anggaran 1 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah, menyatakan bahwa:

“Struktur sudah sesuai, selama diikuti dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik”.

“Belum efektif, karena tingkat kinerja antara sebelum dan sesudah perubahan struktur organisasi belum menghasilkan sesuatu yang lebih baik, maksudnya jika diukur dengan tingkat realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Statistik belum konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika yang dijadikan tolak ukurnya adalah kesesuaian program pembangunan dengan dokumen perencanaan yang ada, maka struktur yang ada saat ini lebih menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi”.

“Jika harus dirubah maka struktur harus memperhatikan kebutuhan daerah yang dilandasi oleh keunggulan dan karakteristik serta kebutuhan daerah. Bisa saja suatu keunggulan atau karakteristik yang dimiliki daerah memerlukan penanganan khusus sehingga diperlukan struktur khusus yang membidangi masalah tersebut”.

“Yang harus ada pada Bappeda, meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, evaluasi”.

l. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah,

menyatakan:

“Struktur yang ada saat ini belum sesuai. Seharusnya perlu dibuat suatu bidang yang mampu melakukan kajian-kajian terhadap seluruh potensi yang ada sehingga hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan yang komprehensif dan layak untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah”.

“Efektifitas organisasi sudah baik, jika melihat kecenderungan meningkatnya kualitas perencanaan yang dilaksanakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program pembangunan dengan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan yang ada”

“Faktor-faktor yang harus mendapatkan perhatian jika terjadi perubahan struktur adalah faktor karakteristik provinsi kepulauan, faktor pengelolaan dan pemanfaatan SDA, sebaiknya dibentuk struktur setingkat eselon IV untuk mengakomodir kekhususan sesuai dengan karakteristik wilayah”.

“Kriteria yang harus ada pada lembaga perencanaan adalah memiliki SDM bidang perencanaan dari berbagai disiplin ilmu. Adanya struktur jabatan fungsional perencana di dalamnya”.

m. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, mengemukakan pendapatnya:

“Struktur yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan perencanaan di daerah terutama terhadap sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Sebagai contoh, urusan kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu sektor unggulan daerah saat ini berada dibawah koordinator bidang ekonomi Bappeda. Namun berbicara kelautan dan perikanan bukan hanya sebatas produksi yang memiliki nilai ekonomis semata, tapi didalamnya juga terdapat pengembangan wilayah pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga menurut saya perlu dibentuk suatu bidang pengembangan kelautan dan perikanan dengan sub bidang yang berkenaan dengan urusan kelautan perikanan sebagaimana tersebut diatas”.

Terhadap efektifitas organisasi Bappeda, dikemukakan:

“Belum efektif, karena suatu objek (urusan) masih ditangani oleh berbagai bidang. Ketika berbicara masalah produksi perikanan maka kita akan berbicara bidang ekonomi tapi ketika berbicara tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan dan pulau-pulau kecil maka kita akan berbicara bidang sosial budaya”.

Lebih lanjut tentang factor-faktor yang menjadi perhatian jika struktur harus dirubah kembali, dinyatakan:

“Pembangunan harus dilakukan berdasarkan orientasi yang dilandasi pada keunggulan dan karakteristik daerah. Sektor-sektor yang merupakan keunggulan daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam hal pengembangan dan perencanaannya, minimal dibutuhkan struktur setingkat eselon IV yang secara khusus membawahi sektor kelautan perikanan dimana nantinya sub bidang tersebut akan melakukan perencanaan, pengkajian dan pengembangan sektor kelautan secara utuh termasuk pengembangan SDM nya, wilayah pesisir, dsb”.

Ketika berbicara mengenai criteria yang harus ada pada lembaga perencanaan, dikemukakan:

“Bappeda harus berfungsi sebagai wadah berbagai kegiatan perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor, lembaga, dan kawasan yang perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan”.

- n. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengemukakan pendapatnya terkait dengan struktur organisasi Bappeda:

“Struktur yang ada sudah sesuai. karena struktur yang ada pada Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini merupakan implementasi dari PP Nomor 41 Tahun 2007, dimana setiap peraturan yang dibuat tentunya telah dikaji secara mendalam”.

“Ya struktur sudah efektif dan efisien tentunya. Dengan jumlah struktur organisasi yang lebih “ramping” dibandingkan sebelumnya Bappeda dan Statistik tetap mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik”.

“Yang harus diperhatikan jika terjadi perubahan struktur organisasi adalah penajaman pada tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada di Bappeda itu sendiri, terutama dalam rangka untuk menghindari terjadinya tumpangtindih kewenangan dengan SKPD lain seperti yang masih sering terjadi saat ini. Harus dijelaskan bagaimana fungsi dan kedudukan Bappeda dan dimana fungsi dan kedudukan SKPD lain di dalam suatu urusan”.

“Yang harus dimiliki oleh lembaga perencana seperti Bappeda dan Bappenas adalah harus memiliki fungsi perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang menjadi satu kesatuan bagian”.

- o. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pendapatnya:

“Struktur saat ini Cukup efektif. Efektif dalam arti pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan struktur terdahulu namun belum cukup memberikan nilai tambah bagi pemerintah provinsi secara umum. Mungkin yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah penataan SDM, dimulai dari penempatan SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya terutama bagi pejabat struktural dan pegawai Bappeda itu sendiri”.

“Yang harus dipertimbangkan jika terjadi perubahan struktur organisasi adalah adanya jabatan wakil kepala Bappeda ataupun SKPD lainnya, dibutuhkan dalam rangka peningkatan koordinasi intern lembaga itu sendiri. Wakil kepala sebaiknya memiliki tingkat eselon yang berada di

bawah kepala Bappeda namun harus berada diatas sekretaris atau kepala bidang. Idealnya wakil ketua setingkat eselon IIB”.

“Kriteria yang harus ada pada lembaga perencanaan adalah Litbang. Dengan harapan setiap output yang dihasilkan oleh Bappeda merupakan sesuatu yang visible untuk dilaksanakan. Litbang tidak hanya dilakukan untuk mendukung fungsi perencanaannya saja tapi juga evaluasi, dimana setiap kegiatan yang telah dilakukan seharusnya dievaluasi dengan kajian yang mendalam sejauh mana program yang telah dilaksanakan tersebut mampu member dampak bagi pembangunan sebagai suatu kesatuan yang pada akhirnya hasil kajian evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dimasa yang akan datang.

Dari wawancara-wawancara yang telah dilakukan terhadap Informan/narasumber diatas terdapat beberapa fakta atau temuan terhadap aspek struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini dengan lingkup kesesuaian struktur organisasi, efektifitas organisasi, faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan jika struktur dirubah dan masukan terhadap criteria seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh lembaga perencanaan seperti Bappeda dan Statistik.

Beberapa jawaban memiliki substansi yang sama, dapat diinventarisir beberapa temuan atau fakta dalam penelitian ini terkait dengan struktur organisasi Bappeda dan Statistik, antara lain:

a. Kesesuaian struktur organisasi:

- 1) Hampir seluruh informan menyatakan bahwa struktur yang ada sudah sesuai dan berpendapat:
  - a) Bahwa struktur dibuat setelah dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan kebutuhan;
  - b) Telah diikuti dengan tugas dan fungsinya dengan baik.

- 2) Beberapa informan yang menyatakan bahwa struktur organisasi saat ini belum efektif berpendapat:
  - a) Harus ada bidang baru yang mampu mengakomodir kebutuhan lainnya seperti, karakteristik wilayah kepulauan, keunggulan sumber daya alam, bidang yang mampu melakukan kajian-kajian terhadap potensi yang dimiliki
  - b) Masih terjadinya tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang dengan beberapa SKPD lain;
  - c) Sub bidang yang ada pada masing-masing bidang belum mempertimbangkan kuantitas dari mitra SKPD.
- b. Efektifitas organisasi Bappeda dan Statistik
  - 1) Sebagian besar informan menyatakan bahwa struktur yang ada saat ini sudah efektif dan berpendapat:
    - a) Bahwa pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi sudah berjalan dengan baik;
    - b) Ada *trend* positif terhadap capaian kesesuaian program dengan dokumen perencanaan yang ada;
    - c) Kinerja organisasi tetap baik meski terjadi perampingan pada struktur organisasi pasca diterapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007.
  - 2) Sedangkan beberapa informan yang menyatakan bahwa struktur yang ada saat ini belum efektif berpendapat:
    - a) Belum ada peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan struktur terdahulu;

- b) Masih adanya satu urusan yang menjadi beberapa tanggungjawab pada beberapa bidang;
  - c) Beberapa fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik belum berjalan dengan baik, seperti fungsi statistik, penelitian dan pengembangan;
  - d) Adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi urusan seperti urusan statistik, tataruang, dsb.
- c. Faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan jika terjadi perubahan struktur lagi:
- 1) Diperlukannya pembentukan bidang yang menangani pengembangan SDA, daerah kepulauan dan pesisir, pengembangan dan penelitian;
  - 2) Diperlukannya jabatan Wakil Kepala Bappeda dan Statistik setingkat eselon IIb;
  - 3) Diperlukannya suatu pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpangtindih dengan SKPD atau lembaga lain di daerah;
  - 4) Jabatan yang ada bersifat struktural yang setiap saat dapat dipindahtugaskan sehingga perlu diaktifkan jabatan fungsional perencana;
- d. Kriteria yang harus ada pada lembaga perencanaan:
- 1) Jabatan fungsional perencana;
  - 2) SDM harus memiliki kemampuan baik akademis maupun teknis di bidang perencanaan;

- 3) Harus ada bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Lingkup kegiatan perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor, lembaga, dan kawasan yang perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- 5) Fungsi perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang menjadi satu kesatuan bagian.

## 2. Proses Perencanaan

Selanjutnya akan dikaji hasil penelitian ditinjau dari aspek tahapan perencanaan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 melekat pada tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang menangani bidang perencanaan pembangunan di daerah. Pada penelitian ini, peneliti bermaksud ingin mengetahui seberapa besar peran tersebut telah dijalankan oleh Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama yang menyangkut peran penyusunan rencana pembangunan daerah.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang). Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan

masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Dengan cara yang berbeda Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengelola program dan dana yang terkumpul dari diri mereka yang telah diserahkan kepada negara dengan membayar pajak, retribusi dan pungutan lain yang sah, sehingga masyarakat mampu untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil.

Efektifitas perencanaan juga dapat dilihat dari hasil pelaksanaannya. Dana yang telah dianggarkan ternyata tidak maksimal digunakan. Tabel dibawah ini dapat menjelaskan hal tersebut:

Tabel. 4.1  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)  
(dalam Juta Rupiah)

TAHUN 2007	: Rp. 77.523,4
TAHUN 2008	: Rp. 254.692,4
TAHUN 2009	: Rp. 315.465,9
TAHUN 2010	: Rp. 264.129,7

Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berikut ini akan disajikan hasil pengumpulan data yang dihimpun peneliti melalui metode wawancara terhadap informan/narasumber penelitian terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik dalam melaksanakan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bangka Belitung dan definisi atau konsep perencanaan dan musrenbang yang dipahami oleh masing-masing informan:

a. Sekretaris Bappeda dan Statistik menyatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilaksanakan saat ini telah melalui tahapan dan proses perencanaan yang sesuai”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “Perencanaan adalah proses mengarahkan kegiatan manusia dan sumber daya alam dengan berorientasi ke masa depan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya.

b. Kepala bidang Ekonomi Bappeda dan Statistik, menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah melalui proses perencanaan yang baik, dimana hampir seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan dokumen – dokumen perencanaan yang ada, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih diluar dokumen perencanaan namun karena sifatnya mendesak dan situasional sehingga harus dilaksanakan, namun hanya sedikit sekali yang seperti itu”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa:

“Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Sedangkan musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya.

- c. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik pada Bappeda dan Statistik mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Perencanaan yang dilaksanakan saat ini telah sesuai dengan proses yang ada” sedangkan pengertian perencanaan dan Musrenbang didefinisikan:

“Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi untuk mengembangkan strategi yang optimal terkait tindakan masa depan untuk mencapai seperangkat tujuan yang diinginkan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya”.

- d. Kepala Bidang Sosbud Bappeda dan Statistik menyatakan bahwa:

“Sudah melalui proses perencanaan yang sesuai”, untuk definisi perencanaan dan Musrenbang dinyatakan:

“Perencanaan adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya terhadap RPJMD. Dalam musrenbang diberi kesempatan kepada para pelaku pembangunan

untuk mengusulkan program kegiatan yang dianggap sangat mendesak untuk dilakukan.

e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan Statistik,

berpendapat:

Perencanaan masih belum dilaksanakan sesuai tahapannya, artinya masih banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui forum RKPD dan Musrenbang. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut biasanya muncul pada saat pembahasan di tingkat legistalif.

Lebih lanjut dikemukakan definisi dari perencanaan dan musrenbang:

“Perencanaan adalah sesuatu yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan – kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah”.

f. Ka.Sub. Bid. Tata Ruang Bidang fisra Bappeda dan Statistik,

mengemukakan pendapatnya yang berkenaan dengan tahapan perencanaan yang dilaksanakan Bappeda dan Statistik serta konsep perencanaan dan musrenbang:

“Sudah secara procedural, namun pelibatan partisipasi masyarakat masih cukup minim” lebih lanjut dinyatakan bahwa:

“Perencanaan adalah proses bagaimana tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilaksanakan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran yang direncanakan”.

g. Kasub. Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Statistik,

berpendapat:

“Sudah melalui proses yang benar” dan dinyatakan lebih lanjut bahwa:

“Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang secara detail dalam menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya”.

- h. Ka.Sub. Bag. Penyusunan Perencanaan Bappeda dan Statistik, berpendapat

“Proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik namun nilai atau hakikat dari proses perencanaan itu sendiri terkadang masih belum ideal dimana dalam proses perencanaan yang dilaksanakan terkadang mendorong masyarakat berpikir pragmatis dalam merencanakan dan mengusulkan program pembangunan. Akibatnya program yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah. Malah dalam keadaan tertentu, usulan masyarakat ini terkait dengan keinginan sekelompok orang yang dititipkan”.

Berkenaan dengan definisi perencanaan dan musrenbang dinyatakan:

“Perencanaan adalah suatu penerapan ramalan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, ekonomi dan politik, potensi sistem untuk berkembang, kepentingan daerah dan pelayanan masyarakat yang mencakup dalam sistem tersebut. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu forum tahunan para pemangku kepentingan didalam pembangunan untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Musrenbang dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan yang bersifat partisipatif dimana didalam pelaksanaan hampir semua unsur masyarakat terlibat”.

- i. Staf Sub. Bid Tata Ruang Bidang Fisra Bappeda dan Statistik mengemukakan pendapatnya:

“sudah dilaksanakan sesuai mekanisme” pengertian dari perencanaan dan musrenbang:

“Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Musyawarah

perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan daerah dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia.

- j. Ka.Sub. Bag Perencanaan dan Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika mengemukakan pendapatnya:

“Tahapan penyusunan perencanaan sudah sesuai, berjenjang dari tingkatan pemerintah desa hingga pemerintah pusat”, selanjutnya dinyatakan bahwa:

“Perencanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menentukan dan membuat strategi untuk mencapai tujuan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membangun kesepakatan – kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rancangan kerja pemerintah daerah yang akan dilaksanakan tahun berikutnya”.

- k. Kepala Seksi Anggaran I Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, menyatakan bahwa:

“Perencanaan belum dilakukan sesuai prosedur yang ada, karena tidak jarang dijumpai kekecewaan masyarakat terhadap proses Musrenbang ini karena banyaknya usulan mereka yang tidak dapat dibiayai. Biasanya ini terkait dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah” dan

“Perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumberdaya yang ada. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum multi pihak yang secara bersama dan terbuka mengidentifikasi dan menyusun rencana pembangunan masyarakat”.

- l. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, menyatakan:

“Ya secara prosedur namun dalam pelaksanaannya masih belum mencerminkan perencanaan yang partisipatif, maksudnya keterlibatan masyarakat secara langsung terutama pada tingkatan musrenbang desa dimana usulan yang disampaikan masih belum menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau masih

hanya berupa keinginan dari beberapa pihak saja sehingga masih banyak ditemui berbagai proyek kegiatan pemerintah tidak secara utuh mampu dirasakan oleh masyarakat” dan lebih lanjut dinyatakan: “Perencanaan adalah usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan di berbagai tingkatan (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional) untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan.

m. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, mengemukakan pendapatnya:

“Belum, masih banyak program pembangunan yang naik di jalan karena terkait adanya sisa anggaran belanja daerah, ironisnya, program pembangunan di luar perencanaan ini datang dari anggota legislatif yang seharusnya mengawal proses Musrenbang ini. Keterlibatan anggota legislatif turut serta “mengacaukan” mekanisme Musrenbang ini disebabkan adanya tanggungjawab politik mereka kepada konstituen untuk merealisasikan janji politiknya, terutama terkait dengan pembangunan di daerah pemilihannya” sedangkan perencanaan dan musrenbang didefinisikan:

“Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah mekanisme untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang ini erat kaitannya dengan upaya pemerintah mencari legitimasi terkait program yang dilaksanakan”

n. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengemukakan pendapatnya:

“Proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat beberapa kendala, terutama yang berasal dari kalangan legislatif, dimana biasanya usulan program yang telah dibahas dari tahapan paling bawah masih dapat dirubah dengan beberapa alasan antara lain, masih kurangnya kesadaran rekan-rekan di legislatif untuk turun sejak awal didalam pelaksanaan musrenbang

dari tingkat kecamatan atau kabupaten yang menjadi dapilnya masing-masing, kemudian terkait dengan waktu masa reses Anggota DPRD yang baru dilaksanakan setelah pelaksanaan musrenbang sehingga hasil reses yang merupakan penjarangan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen mereka belum diakomodir didalam pelaksanaan musrenbang sehingga seringkali di tahapan akhir proses penyusunan rencana pembangunan tiba-tiba muncul kegiatan yang diusulkan tidak melalui musrenbang”, selanjutnya dinyatakan bahwa:

“Perencanaan adalah suatu langkah atau tahapan awal sebelum dimulainya suatu kegiatan, didalam perencanaan dipertimbangkan apa yang menjadi tujuan, bagaimana melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu forum tahunan yang dilaksanakan dalam rangka untuk menghimpun aspirasi masyarakat atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di tahun berikutnya, musrenbang dilaksanakan mulai dari kelompok masyarakat terkecil (desa) hingga tingkat nasional.

- o. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pendapatnya:

“Sudah. Sesuai dengan sifatnya yang partisipatif artinya perencanaan telah melibatkan semua unsur yang dimulai dari tingkatan terendah”, dijelaskan lebih lanjut bahwa:

“Perencanaan adalah proses yang berkelanjutan, bertahap dan tertata rapi. Artinya perencanaan tidak bersifat mutlak, kaku tetapi ada peluang untuk perbaikan dan sisipan kebijakan baru. Dengan demikian perencanaan adalah proses yang berkelanjutan dalam rangka menyempurnakan aktifitas untuk mewujudkan tujuan bersama. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu forum tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan untuk menghimpun aspirasi masyarakat atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di tahun berikutnya”.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Informan/narasumber pada penelitian ini, terdapat keragaman jawaban mengenai definisi perencanaan dan musrenbang, namun secara

umum apa yang disampaikan Informan/narasumber memiliki makna yang hampir serupa oleh karenanya peneliti tidak melakukan klasifikasi pada jawaban tersebut, sedangkan untuk jawaban Informan/narasumber mengenai aspek perencanaan yang selama ini telah dilaksanakan akan diklasifikasi menjadi dua, yaitu informan yang menjawab bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama ini telah melalui proses yang benar dan Informan/narasumber yang menjawab bahwa selama ini penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum melalui proses dan mekanisme yang benar.

Adapun beberapa temuan atau fakta setelah dilakukan analisis terhadap proses pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka temuan atau fakta tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Kelompok Informan/narasumber yang menyatakan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan sudah melalui proses yang ada, menyatakan:
  - 1) hampir seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih diluar dokumen perencanaan namun karena sifatnya mendesak dan situasional sehingga harus dilaksanakan, namun hanya sedikit sekali yang seperti itu;
  - 2) berjenjang dari tingkatan pemerintah desa hingga pemerintah pusat;

- b. Kelompok Informan/narasumber yang menyatakan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan belum melalui proses yang ada, menyatakan:
- 1) masih banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui forum RKPD dan Musrenbang. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut biasanya muncul pada saat pembahasan di tingkat legistalif.
  - 2) Nilai atau hakikat dari proses perencanaan itu sendiri terkadang masih belum ideal dimana dalam proses perencanaan yang dilaksanakan terkadang mendorong masyarakat berpikir pragmatis dalam merencanakan dan mengusulkan program pembangunan. Akibatnya program yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah. Malah dalam keadaan tertentu, usulan masyarakat ini terkait dengan keinginan sekelompok orang yang dititipkan;
  - 3) Banyaknya usulan mereka yang tidak dapat dibiayai;
  - 4) belum mencerminkan perencanaan yang partisipatif, maksudnya keterlibatan masyarakat secara langsung terutama pada tingkatan musrenbang desa dimana usulan yang disampaikan masih belum menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau masih hanya berupa keinginan dari beberapa pihak saja sehingga masih banyak ditemui bergabai proyek kegiatan pemerintah tidak secara utuh mampu dirasakan oleh masyarakat;
  - 5) Banyak program pembangunan yang naik di jalan karena terkait adanya sisa anggaran belanja daerah;

6) Terdapat beberapa kendala, terutama yang berasal dari kalangan legislatif, dimana biasanya usulan program yang telah dibahas dari tahapan paling bawah masih bias dirubah dengan beberapa alasan antara lain, masih kurangnya kesadaran rekan-rekan di legislatif untuk turun sejak awal didalam pelaksanaan musrenbang dari tingkat kecamatan atau kabupaten yang menjadi dapilnya masing-masing, kemudian terkait dengan waktu masa reses Anggota DPRD yang baru dilaksanakan setelah pelaksanaan musrenbang sehingga hasil reses yang merupakan penjarangan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen mereka belum diakomodir didalam pelaksanaan musrenbang sehingga seringkali di tahapan akhir proses penyusunan rencana pembangunan tiba-tiba muncul kegiatan yang diusulkan tidak melalui musrenbang

Dari hasil inventarisir data dapat diketahui bahwa ternyata selama ini proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesungguhnya telah melalui mekanisme yang benar, namun dampak atau keluaran (*output*) yang dihasilkan masih belum mencerminkan adanya suatu perencanaan yang bersifat partisipatif dan akomodatif dimana adanya indikasi pelibatan masyarakat didalam proses penyusunan perencanaan masih minim, masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan yang tidak melalui proses musrenbang dan masih banyaknya kegiatan yang telah diusulkan namun tidak dapat dilaksanakan.

### 3. Dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Bahwa dalam dokumen – dokumen perencanaan tersebut diharapkan mampu mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pada bagian ini akan disajikan hasil dari wawancara antara peneliti dengan informan penelitian terkait dengan kemampuan dokumen-dokumen perencanaan yang ada dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.

a. Sekretaris Bappeda dan Statistik menyatakan bahwa:

“Dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas”.

- b. Kepala bidang Ekonomi Bappeda dan Statistik, menjelaskan bahwa:

“RPJP dan RPJMD menurut saya, saat ini masih sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat, karena RPJP dan RPJMD yang ada dibuat bersifat kualitatif dan dibuat cakupan program yang seluas-luasnya yang akan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat”.

- c. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik pada Bappeda

dan Statistik mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Sudah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat namun masih sering tidak dilaksanakan dengan berbagai macam alasan”.

- d. Kepala Bidang Sosbud Bappeda dan Statistik menyatakan bahwa:

“RPJP, RPJMD dan RKPD sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas namun dalam pelaksanaannya masih banyak program yang ada pada dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam alasan”.

- e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan Statistik,

berpendapat:

“Belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat karena keterbatasan anggaran, artinya program kegiatan yang direncanakan belum tentu dilaksanakan mengingat adanya suatu constrain berupa kendala keterbatasan anggaran. Mengingat khusus untuk RPJP dan RPJMD telah disusun tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah pada tahun pelaksanaan, begitu juga RKPD disusun hanya berdasarkan proyeksi anggaran sehingga masih ada kemungkinan Program dalam RKPD pun tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran”

- f. Ka.Sub. Bid. Tata Ruang Bidang fisra Bappeda dan Statistik,

mengemukakan pendapatnya

“RPJP dan RPJMD secara luas telah mengakomodir kebutuhan masyarakat namun masih secara umum dan kualitatif mengingat sifatnya yang jangka panjang dan menengah namun RKPD lebih

mampu mengakomodir karena bersifat jangka pendek jadi dapat berdasarkan isu-isu actual dan kebutuhan terkini”.

- g. Kasub. Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Statistik,

berpendapat:

“Dokumen perencanaan tersebut sesungguhnya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun dalam implementasinya masih banyak yang tidak dilaksanakan mengingat beberapa hal antara lain keterbatasan anggaran dan adanya indikasi bahwa SKPD lebih suka melaksanakan program-program yang telah mereka laksanakan sebelumnya”

- h. Ka.Sub. Bag. Penyusunan Perencanaan Bappeda dan Statistik,

berpendapat:

“RPJP, RPJMD dan RKPD sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat banyak.

- i. Staf Sub. Bid Tata Ruang Bidang Fisra Bappeda dan Statistik

mengemukakan pendapatnya:

“Secara luas dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat karena sifat kualitatif yang dimilikinya terutama untuk RPJP dan RPJMD, target dan sasaran masih sangat kualitatif sehingga penafsiran terhadap program pembangunan menjadi lebih fleksibel”.

- j. Ka.Sub. Bag Perencanaan dan Pusat Data Dinas Komunikasi dan

Informatika mengemukakan pendapatnya:

“Dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat karena memiliki sifat kualitasif sehingga dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan”.

- k. Kepala Seksi Anggaran I Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah, menyatakan bahwa:

“Dokumen perencanaan yang ada saat ini secara garis besar sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama karena sifatnya yang

kualitatif sehingga lebih aplikatif untuk dilaksanakan dan program yang ada dapat dikaitkan dengan beberapa kegiatan”

- l. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, menyatakan:

“Dokumen perencanaan yang ada sudah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas terutama RKPD yang disusun berdasarkan isu strategis yang berasaskan tema kekinian”.

- m. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, mengemukakan pendapatnya:

“Dokumen perencanaan saat ini sudah cukup mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat”.

- n. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengemukakan pendapatnya:

RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagian besar sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun sebaiknya dokumen perencanaan tersebut dibuat lebih kuantitatif terutama RKPD dan kemudian RPJMD sehingga target dan sasaran dari rencana dapat terukur dengan baik yang pada akhirnya akan memudahkan untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah didalam pembangunan”.

- o. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pendapatnya:

“Secara harfiah RKPD, RPJMD dan RKPD sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dikarenakan sifatnya yang kualitatif sehingga dokumen tersebut sangat implementatif dalam mengkaitkan atau menghubungkan suatu kegiatan dengan program-program yang ada”.

Dari wawancara-wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Informan/narasumber, diidentifikasi terdapat beberapa temuan atau fakta yang terkait dengan kemampuan dokumen-dokumen perencanaan yang ada mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Beberapa temuan atau fakta tersebut selanjutnya akan dikalsifikasi menjadi, kelompok informan yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan yang ada saat ini sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas dan kelompok informan yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Adapun inventarisasi temuan atau fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dokumen perencanaan yang ada saat ini sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas, dikemukakan bahwa:
  - 1) Dokumen-dokumen yang ada bersifat kualitatif sehingga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan cakupan yang luas dan implementatif terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - 2) RPJP dan RPJMD secara luas telah mengakomodir kebutuhan masyarakat namun masih secara umum dan kualitatif mengingat sifatnya yang jangka panjang dan menengah namun RKPD lebih mampu mengakomodir karena bersifat jangka pendek sehingga dapat disusun berdasarkan isu-isu aktual dan kebutuhan terkini;
  - 3) Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut sudah melibatkan seluruh unsur masyarakat dan perwakilannya.

b. Sebagian informan yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan yang ada saat ini sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas, mengemukakan:

- 1) Dalam pelaksanaannya masih banyak program yang ada pada dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam alasan;
- 2) Adanya keterbatasan anggaran, artinya program kegiatan yang direncanakan belum tentu dilaksanakan mengingat adanya suatu *constrain* berupa kendala keterbatasan anggaran. Mengingat khusus untuk RPJP dan RPJMD telah disusun tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah pada tahun pelaksanaan, begitu juga RKPD disusun hanya berdasarkan proyeksi anggaran sehingga masih ada kemungkinan Program dalam RKPD pun tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran,
- 3) Dalam implementasinya masih banyak yang tidak dilaksanakan mengingat beberapa hal antara lain keterbatasan anggaran dan adanya indikasi bahwa SKPD lebih suka melaksanakan program-program yang telah mereka laksanakan sebelumnya”

Berdasarkan inventarisasi terhadap klasifikasi jawaban informan terhadap kemampuan dokumen-dokumen perencanaan yang ada dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dapat diketahui bahwa pada dasarnya dokumen-dokumen perencanaan yang ada telah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas, namun dalam

pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang harus mendapat perhatian untuk perbaikan dimasa yang akan datang terutama yang menyangkut kemampuan anggaran dalam mengakomodir pelaksanaan program yang ada didalam dokumen perencanaan.

#### 4. Uji keabsahan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moleong,2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan sumber dan dokumen.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka yang akan dilakukan adalah membandingkan data hasil wawancara antara informan yang

berasal dari intern Bappeda dan Statistik, mitra kerja (SKPD) dan DPRD Provinsi yang merupakan interpretasi dari perwakilan masyarakat.

Berikut akan disampaikan hasil uji keabsahan penelitian ini dengan menggunakan metode triangulasi teknik pemeriksaan dengan sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara informan yang berasal dari intern Bappeda dan Statistik, mitra kerja (SKPD) dan DPRD Provinsi yang merupakan interpretasi dari perwakilan masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat dibandingkan jawaban-jawaban dari tiga kelompok Informan/narasumber yaitu, kelompok informan yang berasal dari lingkungan Bappeda dan Statistik sebanyak Sembilan orang, kelompok informan yang berasal dari mitra kerja (SKPD) sebanyak empat orang dan dua orang lainnya merupakan kelompok informan yang berasal dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada langkah awal, akan disajikan hasil perbandingan antara pendapat dari ketiga kelompok terhadap aspek struktur organisasi Bappeda dan Statistik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti berkenaan dengan struktur organisasi Bappeda dan Statistik, dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kelompok informan yang berasal dari Bappeda dan Statistik menyatakan;
  - a) Sebagian besar informan menyatakan bahwa struktur Bappeda dan Statistik saat ini sudah seusai dan berjalan efektif;
  - b) Sedangkan sebagian kecil informan lainnya menyatakan bahwa:

- 1) seharusnya ada suatu bidang atau sub bidang yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah sesuai dengan kekhususan dan karakteristik daerah;
  - 2) nomenklatur statistik yang melekat ternyata tidak disertai fungsi sebagai pengolah data statistik, kemudian fungsi penelitian sampai saat ini belum pernah dilaksanakan sendiri oleh pegawai yang ada di lingkungan Bappeda dan Statistik;
  - 3) ditinjau dari sisi fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Statistik masih banyak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang Bappeda dan Statistik dengan SKPD/Lembaga lain.
  - 4) perlu diadakannya jabatan Wakil Kepala Bappeda dengan yang setingkat eselon IIb
  - 5) hanya terdiri dari pejabat struktural yang setiap saat dapat dipindahkan
- 2) Sebagian besar informan yang berasal dari mitra kerja (SKPD) menyatakan bahwa struktur yang sudah ada saat ini sudah sesuai dan sudah efisien, namun beberapa pertimbangan diberikan dalam rangka perbaikan kedepan, antara lain;
- a) struktur yang ada saat ini belum diikuti oleh pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur itu sendiri. Misalnya, pada bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik, sampai saat ini fungsi penelitian dan statistik belum dilaksanakan secara optimal;

- b) terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang selama ini masih tumpang tindih dan tidak optimal dilaksanakan sebaiknya dikaji ulang, apakah fungsi tersebut akan dioptimalkan atau dieliminir dari fungsi Bappeda dan Statistik;
  - c) struktur harus memperhatikan kebutuhan daerah yang dilandasi oleh keunggulan dan karakteristik serta kebutuhan daerah.
  - d) tingkat kinerja antara sebelum dan sesudah perubahan struktur organisasi belum menghasilkan sesuatu yang lebih baik,
  - e) perlu dibuat suatu bidang yang mampu melakukan kajian-kajian terhadap seluruh potensi yang ada;
  - f) meningkatnya kualitas perencanaan yang dilaksanakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program pembangunan dengan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan yang ada;
  - g) belum mampu mengakomodir kebutuhan perencanaan di daerah terutama terhadap sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya.
  - h) suatu objek (urusan) masih ditangani oleh berbagai bidang
- 3) Kelompok informan yang berasal dari Anggota DPRD:
- a) Struktur yang ada pada Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini merupakan implementasi dari PP Nomor 41 Tahun 2007;

- b) Bappeda dan Statistik tetap mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
- c) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan struktur terdahulu namun belum cukup memberikan nilai tambah bagi pemerintah provinsi secara umum;
- d) Adanya jabatan wakil kepala Bappeda ataupun SKPD lainnya, dibutuhkan dalam rangka peningkatan koordinasi intern lembaga itu sendiri;

Dari hasil uji yang menggunakan teknik pemeriksaan dengan sumber, dimana dilakukan perbandingan antara jawaban-jawaban dari kelompok- kelompok informan maka dapat dilihat beberapa temuan dimana terdapat kesamaan persepsi diantara kelompok informan yang menjadi narasumber/informan pada penelitian ini, terutama yang terkait dengan; 1) adanya tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang Bappeda dan Statistik dengan SKPD lain, 2) diperlukannya suatu bidang yang menangani kekhususan dan karakteristik daerah, 3) masih adanya fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik namun belum optimal didalam implementasinya, 4) diperlukannya suatu jabatan Wakil Kepala Bappeda dan Statistik yang setingkat Pejabat Eselon IIb.

Pada langkah selanjutnya akan dilakukan perbandingan pada aspek proses perencanaan pembangunan daerah:

- 1) Kelompok informan yang berasal dari Bappeda dan Statistik menyatakan;
  - a) Seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan dokumen – dokumen perencanaan yang ada,
  - b) Masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih diluar dokumen perencanaan namun karena sifatnya mendesak dan situasional sehingga harus dilaksanakan;
  - c) Masih banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui forum RKPD dan Musrenbang
  - d) Pelibatan partisipasi masyarakat masih cukup minim
  - e) Nilai atau hakikat dari proses perencanaan masih belum ideal dimana dalam proses perencanaan yang dilaksanakan terkadang mendorong masyarakat berpikir pragmatis dalam merencanakan dan mengusulkan program pembangunan.
- 2) Kelompok informan yang berasal dari mitra kerja (SKPD);
  - a) Tahapan penyusunan perencanaan sudah sesuai, berjenjang dari tingkatan pemerintah desa hingga pemerintah pusat;
  - b) Masih banyak usulan program yang direncanakan yang tidak dapat dibiayai. Biasanya ini terkait dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah;
  - c) Masih belum mencerminkan perencanaan yang partisipatif;
  - d) Masih banyak program pembangunan yang naik di jalan karena terkait adanya sisa anggaran belanja daerah.
- 3) Kelompok informan yang berasal dari Anggota DPRD:

- a) Usulan program yang telah dibahas dari tahapan paling bawah masih dapat dirubah;
- b) Perencanaan telah melibatkan semua unsur yang dimulai dari tingkatan terendah.

Dari perbandingan yang dilakukan, terdapat kesamaan persepsi dari masing-masing kelompok informan maupun antara satu kelompok dengan satu kelompok lainnya terhadap aspek proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kesamaan tersebut antara lain; 1) bahwa tahapan penyusunan perencanaan telah melalui proses yang benar, 2) masih adanya program yang dilaksanakan namun tidak melalui proses perencanaan, 3) pelibatan terhadap partisipasi masyarakat didalam penyusunan perencanaan masih rendah.

Selanjutnya akan disajikan perbandingan antara ketiga kelompok informan terhadap aspek dokumen perencanaan dalam penelitian ini.

- 1) Kelompok informan yang berasal dari Bappeda dan Statistik menyatakan;
  - a) Dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas;
  - b) Dalam pelaksanaannya masih banyak program yang ada pada dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam alasan;

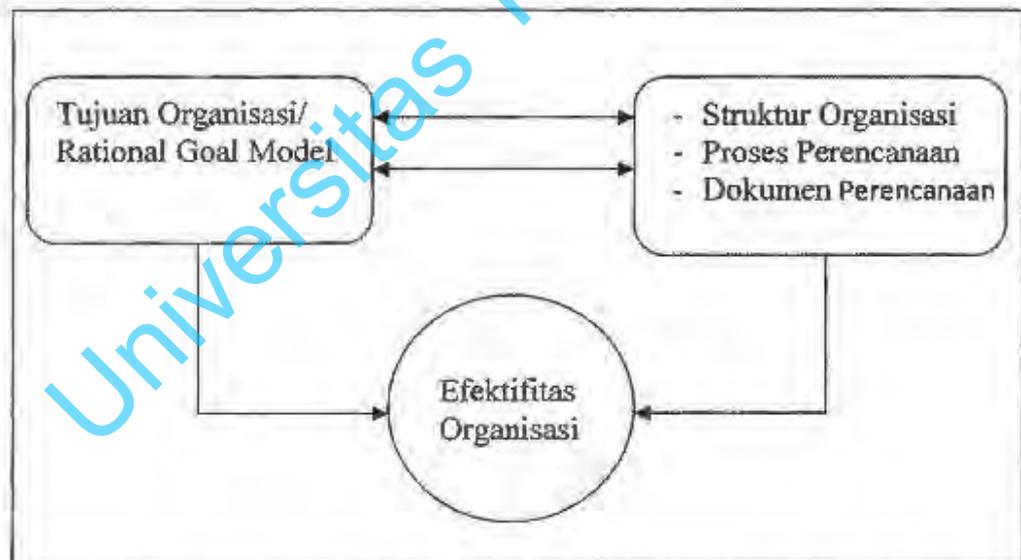
- c) Program kegiatan yang direncanakan belum tentu dilaksanakan mengingat adanya suatu constrain berupa kendala keterbatasan anggaran;
- 2) Kelompok informan yang berasal dari mitra kerja (SKPD) menyatakan;
    - a) Sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama karena sifatnya yang kualitatif sehingga lebih aplikatif untuk dilaksanakan dan program yang ada dapat dikaitkan dengan beberapa kegiatan;
    - b) Dokumen perencanaan yang ada sudah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas terutama RKPD yang disusun berdasarkan isu strategis yang berbasaskan tema kekinian dan isu aktual.
  - 3) Kelompok informan yang berasal dari Anggota DPRD
    - a) RKPD, RPJMD dan RKPD sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dikarenakan sifatnya yang kualitatif sehingga dokumen tersebut sangat implementatif dalam mengkaitkan atau menghubungkan suatu kegiatan dengan program-program yang ada.

Dari perbandingan terhadap aspek dokumen perencanaan yang dilakukan terhadap tiga kelompok informan, diperoleh satu kesamaan persepsi yaitu dokumen perencanaan yang ada saat ini sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat banyak, hal ini disebabkan karena sifat dokumen-dokumen perencanaan yang ada bersifat kualitatif sehingga

memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap program kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan teknik pemeriksaan dengan sumber, dapat diketahui bahwa ketiga kelompok informan memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman didalam memahami konteks dari penelitian ini sehingga derajat kepercayaan dari data penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara secara mendalam terhadap informan dapat dikatakan memiliki tingkat konsistensi dan validitas yang baik.

Secara keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketiga informan, dapat dirumuskan suatu temuan seperti pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1. Rumusan Hasil Wawancara Yang Merupakan Elaborasi hasil wawancara

## B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dibahas hasil temuan atau fakta yang diperoleh peneliti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian

temuan sebelumnya. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan klasifikasi terhadap aspek-aspek struktur organisasi, proses perencanaan dan dokumen perencanaan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya

## 1. Struktur Organisasi

Dari hasil wawancara diperoleh beberapa temuan terkait dengan aspek struktur organisasi antara lain: 1) adanya tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang Bappeda dan Statistik dengan SKPD lain, 2) diperlukannya suatu bidang yang menangani kekhususan dan karakteristik daerah, 3) masih adanya fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik namun belum optimal didalam implementasinya, 4) diperlukannya suatu jabatan Wakil Kepala Bappeda dan Statistik yang setingkat Pejabat Eselon II.

a) Terkait dengan adanya temuan tentang tumpang tindih tugas, fungsi dan kewenangan antara Bappeda dan Statistik dengan instansi lain dapat dibuktikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) berada di Bappeda dan Statistik. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, bahwa pelaksanaan urusan tata ruang dari tingkat pusat sampai daerah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Penataan Ruang/di tingkat pusat) dan Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Tata Ruang/di tingkat daerah);

(2) Sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik bahwa urusan data dan pendataan berada di Biro Pusat Statistik sedangkan pada PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah tidak mutlak harus diikuti oleh pemerintah daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan jika merujuk pada Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 6:

- (1) *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.*
- (2) *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.*
- (3) *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:*
  - a. *perumusan kebijakan teknis perencanaan;*
  - b. *pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;*
  - c. *pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan*
  - d. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

Pada pasal 22 butir (5) poin a dinyatakan bahwa:

*"Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari bidang perencanaan pembangunan dan statistik".*

Pasal tersebut dimaksudkan untuk mengelompokkan urusan dan tidak harus diikuti dengan perubahan nomenklatur menjadi Bappeda dan Statistik.

Selanjutnya berkenaan dengan adanya harapan dari kelompok-kelompok informan terhadap adanya suatu bidang yang mampu menangani urusan yang berdasarkan kekhususan dan karakteristik daerah ternyata selaras dengan pasal 22 PP Nomor 41 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

*“Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah”.*

Berdasarkan pasal tersebut dimungkinkan bagi Bappeda dan Statistik untuk menambahkan suatu urusan didalam suatu bidang atau subbidang untuk mengakomodir faktor kekhususan dan kesesuaian terhadap karakteristik daerah meskipun pada pasal lain dinyatakan bahwa untuk lembaga teknis, struktur organisasi hanya terdiri dari 1 sekretariat dengan tiga sub bagian dan empat bidang dengan masing-masing 2 sub bidang.

Bidang atau sub bidang dalam rangka untuk mengakomodir kekhususan dan karakteristik daerah dapat melekat pada bidang atau sub bidang yang sudah ada. Dengan cara merubah atau menambahkan nomenklatur bidang atau sub bidang beserta fungsi yang melekat. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi Bappeda dan Statistik, sebagaimana dikemukakan oleh Steers, ”bahwa efektifitas itu sendiri paling baik dan dapat dimengerti jika dilihat dari sudut dan sejauh mana organisasi tersebut berhasil

mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mengejar tujuan organisasi dan tujuan operasionalnya”.

Temuan atau fakta berikutnya adalah adanya fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik namun dalam implementasinya belum optimal dilaksanakan dengan dokumen pendukungnya. Fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang sampai saat ini belum optimal dilaksanakan adalah fungsi penelitian, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Bappeda dan Statistik pada pasal 9 butir (2) dan poin d:

*“bahwa Uraian Tugas Sub Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan penelitian dan kajian rencana pembangunan daerah”*

sementara berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2008 dan 2009, Bappeda dan Statistik memiliki beberapa program dan kegiatan yang bersifat penelitian, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara mandiri oleh pegawai Bappeda dan Statistik namun dikerjasamakan dengan pihak – pihak lain.

Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi di bidang penelitian menjadi alasan kenapa fungsi penelitian ini masih belum dilaksanakan oleh pegawai yang ada di Bappeda dan Statistik. Sebagai gambaran akan disampaikan informasi mengenai keadaan atau struktur kepegawaian pada Bappeda dan Statistik.

Sampai tanggal 01 Juni 2010, 17 (tujuh belas) jabatan struktural di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terisi, sedangkan jabatan fungsional di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terisi.

Berdasarkan kepangkatan, pegawai yang memiliki kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama Madya / IV d, sedangkan pangkat pegawai yang terendah adalah Juru Muda / I a.

Tabel 4.2  
Pegawai Negeri Sipil Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Berdasarkan Urutan Kepangkatan

No.	PNS berdasarkan golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk. I, IV/b	2
3.	Pembina, IV/a	2
4.	Penata Tk I, III/d	1
5.	Penata, III/c	11
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	11
7.	Penata Muda, III/a	19
8.	Pengatur Tk. I, II/d	2
9.	Pengatur, II/c	1
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	5
11.	Pengatur, II/a	1
	<b>Jumlah</b>	<b>56</b>

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung  
sedangkan CPNS yang ditempatkan di Bappeda dan Statistik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 01 Juni 2010  
seperti tertera pada tabel di berikut ini.

Tabel 4.3

Calon Pegawai Negeri Sipil Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Urutan Kepangkatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Penata Muda Tk. I, III/b	1
2.	Penata Muda, III/a	5
3.	Pengatur, II/a	7
4.	Juru Muda, I/a	2
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

Sumber:Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

Distribusi pegawai yang ditempatkan di Bappeda dan Statistik, baik PNS maupun CPNS, sampai 01 Juni 2010 berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pegawai Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	S1/DIV	44
4.	DIII	3
5.	SMU Sederajat	13
6.	SD Sederajat	2
	<b>Jumlah</b>	<b>71</b>

Sumber:Bappeda dan Statistik Prov. Kep. Bangka Belitung

Menurut data kepegawaian bahwa 8 dari 9 pegawai yang memiliki pendidikan S2 saat ini telah menduduki jabatan struktural. Berdasarkan data dan fakta dari kondisi

kepegawaian yang ada pada Bappeda dan Statistik sampai dengan saat ini, dapat menggambarkan bahwa SDM yang ada dan dianggap memiliki kualifikasi dalam melakukan penelitian saat ini telah berada pada tataran struktural, sehingga secara administrasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Hal lainnya adalah, sampai dengan saat ini kelompok jabatan fungsional belum terisi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian yang ada pada Bappeda dan Statistik sampai dengan saat ini belum dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Bappeda dan Statistik.

Terkait dengan adanya temuan atau fakta terhadap kebutuhan akan suatu jabatan Wakil Kepala Bappeda dan Statistik, penulis mencoba membandingkannya dengan apa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimana Bappeda memiliki struktur Wakil Kepala Bappeda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan suatu jabatan Wakil Kepala Bappeda.

Kebutuhan akan jabatan Wakil Kepala Bappeda perlu dilakukan suatu kajian lebih mendalam, namun berdasarkan kenyataan di lapangan, dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi di lingkungan Bappeda dan Statistik itu sendiri, jabatan Wakil Kepala Bappeda dan Statistik memang dibutuhkan mengingat tingkat aktivitas dan mobilitas Kepala

Bappeda dan Statistik dalam melaksanakan dinas luar. Wakil Kepala Bappeda dan Statistik nantinya diharapkan memiliki tingkatan eselon IIB atau berada diatas tingkatan eselon jabatan sekretaris dan kepala bidang sehingga secara hierarki kepangkatan dan jabatan, Wakil Kepala Bappeda dan Statistik nantinya dapat memberikan perintah selaku pimpinan kepada sekretaris dan kepala bidang pada saat Kepala Bappeda dan Statistik sedang melaksanakan dinas luar.

Dari berbagai fakta diatas, dikaitkan dengan latar belakang penelitian, serta dikonfirmasi ulang dengan kajian teori dan alur pikir penelitian, terlihat bahwa struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini mempunyai beberapa titik lemah, langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap kinerja dan efektifitasnya. Hampir semua narasumber beranggapan bahwa struktur organisasi ini bukan merupakan tanggungjawab Bappeda dan beranggapan bahwa ada tumpang tindih urusan, jabatan yang belum terisi (khususnya jabatan fungsional) dan lain-lain yang tidak mempengaruhi efektifitas Bappeda secara keseluruhan.

Sesuai dengan teori-teori organisasi dan konsep operasional sebagaimana yang dibahas pada Bab II, maka terdapat berbagai konsekuensi yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja dan efektifitas bappeda dan Statistik, yaitu:

- i. Segera mengusulkan perubahan struktur Bappeda dan Statistik, dengan terlebih dahulu membentuk tim evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja;

- ii. Apabila struktur ini masih dipertahankan, maka diharapkan sesegera mungkin melakukan *recruitment* terhadap 4 (empat) unsure kompetensi utama, yaitu: ahli perencanaan untuk mengisi jabatan fungsional perencana, ahli statistik, ahli planologi dengan spesialisasi G.I.S dan *recruitment* tenaga peneliti.

Dari keseluruhan uraian mengenai struktur organisasi Bappeda dan Statistik, dapat ditarik kesimpulan sementara berdasarkan hasil dan data penelitian bahwa struktur yang ada saat ini dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan dan sudah dianggap efektif namun disisi lain banyak juga ditemukan fakta baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan seandainya nanti akan dilakukan perubahan struktur yang baru.

## 2. Proses perencanaan

Pada aspek proses perencanaan ditemukan beberapa fakta yang dikemukakan oleh ketiga kelompok informan, yaitu: (1) tahapan penyusunan perencanaan sudah sesuai dengan proses sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) masih ada program kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui proses perencanaan, (3) masih dianggap proses perencanaan belum bersifat partisipatif, (4) adanya usulan yang telah dibahas namun tidak dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurut UU ini, ada dua entitas penyusun rencana pembangunan, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bappeda (Pasal 33 ayat (2)).
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 33 ayat (3)).

Pendekatan dalam proses rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. Politik;
- b. Teknokratik;
- c. Partisipatif;
- d. Atas-bawah (*top-down*); dan
- e. Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Statistik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana yang terungkap didalam temuan atau fakta penelitian di lapangan dimana hampir semua informan menyatakan hal tersebut.

Terhadap adanya temuan atau fakta pada penelitian bahwa masih ada beberapa program kegiatan yang ada tidak melalui proses dan tahap penyusunan perencanaan dapat dijelaskan bahwa hal tersebut lebih disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan yang sifatnya situasional dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga program yang seperti ini biasanya sering tiba-tiba dimunculkan oleh beberapa SKPD setelah proses penyusunan rencana pembangunan telah dilaksanakan, untuk mengakomodir program tersebut Bappeda dan Statistik mewajibkan SKPD yang mengusulkan program tersebut untuk membuat semacam kajian akademis perihal penting dan mendesaknya program tersebut untuk dilaksanakan. Hasil kajian akademis akan dikaji oleh Bappeda dan Statistik untuk mengetahui tingkat kelayakan program tersebut dan hasilnya

akan dijadikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dibahas bersama dengan Tim Panitia Anggaran Legislatif.

Fakta atau temuan lainnya adalah bahwa proses penyusunan rencana pembangunan daerah saat ini belum memenuhi unsur partisipatif, terkait dengan hal tersebut dijelaskan bahwa Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan pembangunan daerah berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme "*bottom-up planning*", dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, Rakorpus (Rapat Koordinasi Pusat) dan Musrenbang nasional.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat

desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat desa/kelurahan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APB Desa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Pada tingkat kecamatan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu dan permasalahan skala kecamatan, prioritas program dan kegiatan desa/kelurahan, menyepakati program dan kegiatan lintas desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, sebagai masukan bagi Forum SKPD dan bahan pertimbangan kecamatan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan. Musrenbang kecamatan juga menetapkan delegasi kecamatan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota.

Musrenbang kecamatan, selain menjangring kebutuhan nyata masyarakat desa/kelurahan, juga berfungsi untuk memaduserasikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mengidentifikasi program-program/kegiatan yang bersumber dari dana non APBD atau program-program nasional yang langsung ke masyarakat, seperti PNPM. Untuk menjamin agar usulan dari masyarakat ini

disampaikan ke tingkat kabupaten/kota, maka para wakil/delegasi dari tingkat desa/kelurahan, para wakil dari organisasi lembaga kemasyarakatan, terutama kelompok wanita dan kelompok marginal, perwakilan SKPD, juga termasuk anggota DPRD dari daerah asal pemilihan yang berkenaan diwajibkan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan.

Dari penjelasan diatas, dapat diidentifikasi bahwa yang sering menyebabkan proses perencanaan menjadi tidak partisipatif adalah terputusnya mata rantai musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dimana delegasi yang telah diamanatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat desa dan kecamatan sering tidak optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilkannya di dalam musrenbang pada tingkatan diatasnya.

Identifikasi selanjutnya yaitu masih jarang nya Anggota DPRD yang berasal dari daerah asal pemilihannya berkenan untuk menghadiri forum musrenbang sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan sampai ke tingkat legislatif.

Temuan atau fakta berikutnya yang terkait dengan proses perencanaan adalah adanya usulan program yang telah dibahas melalui mekanisme perencanaan yang baik, namun tidak dapat dilaksanakan. Penjelasan terhadap temuan ini adalah, bahwa musrenbang hanya merupakan satu tahapan dari rangkaian proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Masih terdapat serangkaian tahapan yang perlu dilalui, yaitu Rapat Koordinasi Pusat, dan Musrenbang nasional, tahapan perumusan dan

pembahasan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD. Oleh karena itu, efektifitas Musrenbang di dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan sangat ditentukan oleh sejauh mana tahapan yang telah disebutkan di atas konsisten terhadap hasil kesepakatan Musrenbang yang dituangkan kedalam RKPD.

Proses-proses perencanaan diatas, sebelum dituangkan dalam rancangan APBD, dimana secara teoritis dapat dikatakan bahwa RKPD merupakan salah satu tolak ukur terlaksananya tujuan resmi organisasi (*"Official Goals"*). Ternyata bahwa proses dan pencapaian tujuan Bappeda dan Statistik, sudah terlaksana dan dinilai cukup efektif oleh hampir semua informan. Meskipun setelah RKPD disahkan, untuk kemudian semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mem-breakdown dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), masih sering terjadi ketidak sesuaian, hal ini dianggap oleh semua informan bukan sebagai kelemahan Bappeda dan Statistik.

Meskipun demikian, untuk mengatasi semua fenomena seperti diatas, merupakan salah satu tugas Bappeda dan Statistik juga dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar konsistensi perencanaan dapat berlangsung dengan baik, sebagaimana yang dimaksud dengan pelaksanaan tujuan operasional (*"Operative Goals"*).

Kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam usaha untuk mengakomodir seluruh program sebagaimana yang terdapat didalam dokumen RKPD adalah masalah

terbatasnya anggaran, sehingga harus mendahulukan program dan kegiatan yang benar-benar mendesak dan mejadi prioritas untuk dilaksanakan.

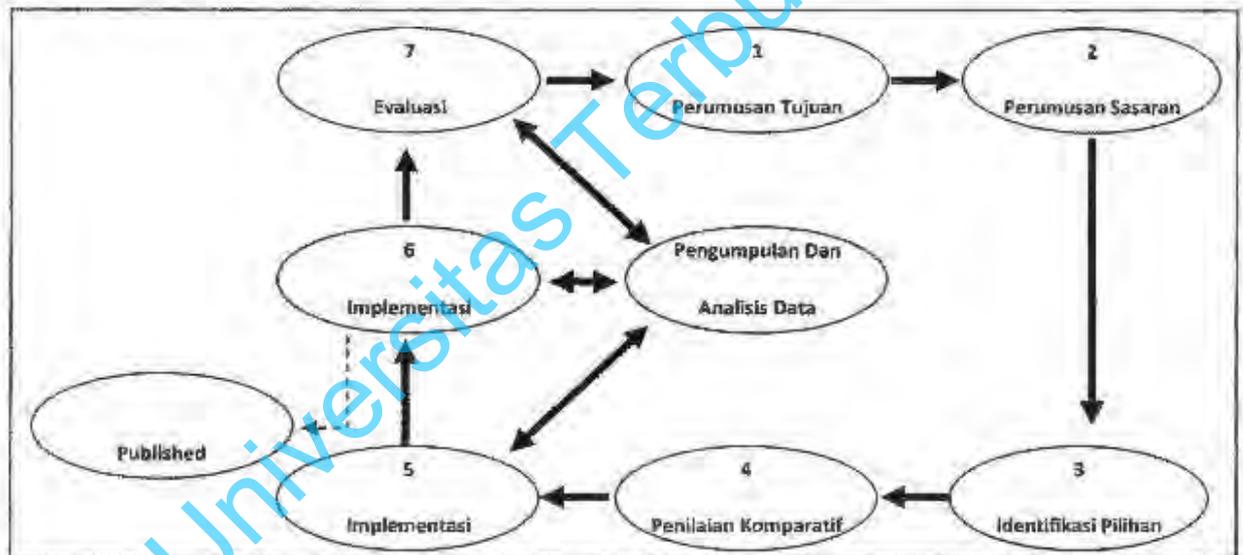
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap aspek proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara dimana proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan saat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa masukan atau perbaikan yang harus dilakukan didalam implementasi pelaksanaan penyusunannya.

### **3. Dokumen perencanaan**

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikenal beberapa macam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Setiap SKPD, sebelum mengusulkan program-program dalam forum SKPD mestinya melakukan berbagai identifikasi dan kajian-kajian teknis dipadukan dengan potensi serta sumber daya yang ada, sehingga pada saat usulan-usulan tersebut dibawa dalam Musrenbang akan lebih mendekati kebutuhan masyarakat atau lebih rasional. Identifikasi dan kajian tersebut secara ringkas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2. Siklus Perencanaan (Bappenas : 2002)

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen-dokumen perencanaan yang ada diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan masyarakat secara luas, oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melihat sejauh mana dokumen perencanaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.

Dari aspek dokumen perencanaan yang ada dapat dikemukakan beberapa temuan atau fakta yang berhasil diidentifikasi oleh ketiga kelompok informan adalah bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat meskipun masih

didalam implementasinya beberapa program yang ada tidak mampu direalisasikan dengan berbagai pertimbangan.

Tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik terkait dengan dokumen perencanaan yang ada ini adalah dimulai dari tahapan penyiapan rancangan dokumen, penyelenggaraan musrenbang dan menghimpun serta menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Bappeda dan Ststistik didalam pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya melakukan evaluasi dengan cara mengevaluasi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan, selain itu dilaksanakan juga monitoring langsung ke lapangan tempat pelaksanaan program dan kegiatan untuk membandingkan laporan tersebut dengan kondisi yang ada dilapangan.

Adapun hasil pelaksanaan pembangunan selama dua tahun terakhir sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5  
Realisasi Capaian Pelaksanaan Program Dana APBD Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung 2008 - 2009

No	Tahun	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
1.	2008	79,79	95,60
2.	2009	74,51	99,47

Sumber. LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2009 dan 2010

Dari tabel 4.5 jelas terlihat adanya peningkatan yang terjadi pada pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD. Realisasi fisik pada tahun 2008 sebesar 95,60% meningkat menjadi sebesar 99,47% pada tahun 2009. Pada realisasi keuangan pada tahun 2008 mencapai 79,79% namun mengalami penurunan menjadi 74,51% pada tahun 2009. Mengingat peningkatan realisasi fisik maka penurunan realisasi keuangan diasumsikan sebagai suatu efisiensi.

Proses perencanaan yang akhirnya menghasilkan dokumen perencanaan merupakan perwujudan tujuan organisasi dalam bentuk "*Rational Goal Model*", sebagaimana yang diinginkan oleh kerangka berpikir dan konsep operasional pada Bab II.

Mekanisme untuk menghasilkan dokumen-dokumen tersebut, baik dokumen utama maupun dokumen-dokumen penunjang sesuai dengan amanah Undang-undang 25 Tahun 2004 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu dicermati lebih lanjut tentang konsistensi antara perencanaan makro (pada tingkat nasional dan provinsi) dengan perencanaan mikro (pada tingkat SKPD dan Kabupaten/Kota). Implementasi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD melalui kegiatan sektoral

masing-masing, meski terus menerus dimonitor dan evaluasi. Kelamahan paling utama dalam sisi perencanaan pembangunan ini antara lain:

- i. Meskipun telah disusun RPJPD dan RPJMD, tetapi penjabaran operasionalnya dalam bentuk "Grand Strategy" belum dibuat secara formal.
- j. Sektor-sektor dan komoditi-komoditi unggulan belum menunjukkan hasil yang memadai, terutama dalam menunjang PDRB.

Tabel 4.6  
Distribusi Presentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2009 (%)

Lapangan Usaha	2006	2007*)	2008**)	2009***)
Pertanian	18.41	18.67	19.00	19.55
Pertambangan dan penggalian	22.04	20.40	19.24	18.28
Industri Pengolahan	22.28	22.51	22.44	21.48
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.67	0.65	0.58	0.61
Bangunan	5.41	5.87	6.51	6.92
Perdagangan	17.10	17.35	18.12	18.28
Pengangkutan dan Komunikasi	3.25	3.36	3.34	3.30
Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh.	2.72	2.59	2.28	2.39
Jasa-jasa	8.08	8.60	8.49	9.19
<b>PDRB Dengan Migas</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>PDRB Tanpa Migas</b>	<b>96.10</b>	<b>97.06</b>	<b>97.33</b>	<b>97.51</b>

Sumber Data: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan: \*) = Angka Sementara  
 \*\*) = Angka Sangat Sementara  
 \*\*\*) = Angka Sangat-sangat Sementara

Meskipun demikian, hampir semua informan/narasumber mengakui bahwa proses perencanaan dan RPJMD masih dalam jalur yang benar ("On The Track"). Hasil yang ada saat ini merupakan langkah awal dan akan terus berkembang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan hasil pembahasan pada aspek dokumen perencanaan, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan dari sisi pelaksanaan yang dimulai dari proses hingga evaluasi, Bappeda dan Statistik telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini juga dapat terlihat bahwa tingkat kesesuaian antara program pembangunan yang diusulkan SKPD pada saat musrenbang tahun 2010 untuk program kegiatan yang direncanakan di tahun 2011, memiliki tingkat kesesuaian 100 persen terhadap dokumen perencanaan yang ada, meski demikian dalam implementasinya masih belum maksimal yang disebabkan oleh adanya berbagai keterbatasan antara lain keterbatasan anggaran pembangunan dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

#### **4. Pengaruh Tingkat Efektivitas Bappeda dan Statistik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Secara langsung maupun tidak langsung, efektifitas organisasi Bappeda dan Statistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan sekaligus pengendalian pembangunan dapat berimplikasi terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan pada kerangka pemikiran Bab II bahwa salah satu indikator efektivitas Bappeda dan Statistik adalah pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan yang partisipatif sehingga perencanaan

yang dihasilkan akan bersifat aplikatif dan berdampak nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.

Perencanaan yang bersifat aplikatif adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari dilaksanakannya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana proses perencanaan merupakan awal dari tahapan pembangunan yang akan dilakukan.

Secara langsung, perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik memberikan pengaruh kepada masyarakat yaitu melalui beberapa programnya antara lain:

a. Program Raskin

Beras miskin (Raskin) merupakan program pemberian bantuan beras secara gratis kepada keluarga miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pokok dalam bentuk beras.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan dana sebesar Rp. 9.064.800.000 untuk membayar sisa subsidi sebesar Rp.1.600/Kg. Kabupaten/Kota menyiapkan alokasi dana distribusi ke tempat penerima Raskin kabupaten/Kota dan kegiatan lain yang mendukung program Raskin tersebut.

**Tabel 4.7**  
**Alokasi Dana Distribusi ke Tempat Penerima Raskin**  
**Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN/KOTA	APBD (Rp)	SASARAN RTS (Rp)
1	Bangka	462.364.000	4.978
2	Belitung	167.130.000	5.307
3	Bangka Tengah	108.780.000	3.056
4	Bangka Selatan	350.000.000	4.486
5	Bangka Barat	155.090.000	3.294
6	Belitung Timur		4.005
7	Pangkalpinang	132.950.000	3.282

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### b. Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Provinsi melalui dana dekonsentrasi dari tahun 2003 sampai dengan 2009 telah membantu dan memperbaiki rumah serta lingkungan sosial warga masyarakat yang tinggal di lingkungan daerah kumuh sebanyak 920 KK/Unit. Begitu juga dengan perbaikan dan pembangunan rumah layak huni baik yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PU, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota bahkan oleh dunia usaha seperti PT. Timah dan PT. Kobatin dalam rangka memberikan perhatian dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12.374 unit dan yang sudah ditangani lebih kurang 3700 unit.

Sementara secara tidak langsung beberapa hal yang mengindikasikan bahwa perencanaan yang dihasilkan oleh organisasi Bappeda dan Statistik memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah

semakin menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.8.  
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
( 2002 – 2010)

Tahun	Jumlah (Ribuan)	%
2002	106.0	11.62
2003	96.2	10.06
2004	91.8	9.07
2005	96.3	9.74
2006	117.4	10.91
2007	95.4	9.54
2008	86.7	8.58
2009	76.6	7.46
2010	67.75	6.51

Sumber Data: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2006 – 2010 angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan, hingga tahun 2010 bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat berada pada peringkat keempat terbaik sebagai provinsi yang angka kemiskinannya terendah di seluruh Indonesia, hal ini tidak lepas dari peran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui perencanaan yang tepat dan terarah sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Selain sisi sosial kemasyarakatan, perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik juga memiliki dampak positif terhadap kehidupan

ekonomi masyarakat hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya yang memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9  
Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005 – 2008)

Tahun	PDRB Perkapita	Pajak Tak Langsung Netto	Pendapatan Perkapita
2005			
Dengan Migas	12.830.188	724.589	12.105.599
Tanpa Migas	12.233.857	724.589	11.509.268
2006			
Dengan Migas	14.753.470	823.063	13.930.407
Tanpa Migas	14.238.084	823.063	13.415.021
2007			
Dengan Migas	16.170.337	934.919	15.235.418
Tanpa Migas	15.695.377	934.919	14.760.458
2008			
Dengan Migas	19.349.751	1.061.976	18.287.775
Tanpa Migas	18.904.847	1.061.976	17.842.871

Sumber Data: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pendapatan perkapita masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, hal ini tak terlepas dari peran perencanaan yang disusun sehingga dampak dari pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Dengan memperhatikan tabel 4.8 dan 4.9 diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perencanaan yang telah disusun oleh Bappeda dan Statistik baik secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini diindikasikan dengan semakin menurunnya angka

kemiskinan dan meningkatnya angka pendapatan perkapita masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Universitas Terbuka

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari tujuan Organisasi (*Rational Goals Model*) sebagaimana yang tercantum didalam tujuan penelitian ini, Bappeda dan Statistik secara umum sudah efektif dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
2. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara mekanisme perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan dan aplikasi perencanaan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Perencanaan yang holistik, terarah, dan komprehensif serta dapat menampung aspirasi masyarakat (Aplikatif) dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat merupakan tujuan Organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Proses penyusunan perencanaan yang telah dilaksanakan sudah baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dokumen perencanaan yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan Bappeda dan Statistik selaku lembaga teknis yang bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan

daerah sampai dengan pelaksanaan evaluasi telah menunjukkan eksistensinya;

## B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat dihasilkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

### 1. Saran Teoritis

- a. Agar kajian efektivitas dapat lebih mendalam, disarankan perlu dilakukan analisis dengan menggunakan teori: *Competing Value Approach (CVA)*
- b. Perlu pengkajian yang mendalam, untuk kemudian mengusulkan kepada gubernur tentang pembentukan Tim Evaluasi SOTK, bukan hanya berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5,6, dan 7 tahun 2008, tetapi secara keseluruhan. Tim ini nantinya akan bekerjasama dengan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Panitia Khusus (Pansus).

### 2. Saran Praktis:

#### A. Berkenaan dengan aspek struktur organisasi;

- 1) beberapa fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang sampai saat ini masih belum berfungsi dengan baik, harus dioptimalkan. Seperti fungsi penelitian dan pengembangan;
- 2) penamaan atau nomenklatur Statistik yang melekat pada Bappeda dan Statistik sebaiknya dihilangkan saja dan

fungsi statistik sebaiknya dikembalikan kepada Badan Pusat Statistik;

- 3) kekhususan atau karakteristik wilayah dapat dijadikan pertimbangan didalam mengembangkan struktur organisasi jika dilakukan perubahan;
- 4) Struktur jabatan fungsional sebaiknya difungsikan, dimulai dari proses rekrutmen SDM yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dibidangnya.

B Pada aspek proses penyusunan, beberapa hal yang dapat disarankan atau direkomendasikan adalah;

- 1) Diperlukan keterpaduan antara penyusunan perencanaan program dan perencanaan anggaran sehingga program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik;
- 2) Pelibatan partisipasi masyarakat didalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus ditingkatkan dan dimulai dari tingkat desa;
- 3) Pelibatan atau peran aktif dari Anggota DPRD dalam mengikuti proses perencanaan di daerah pemilihannya harus ditingkatkan;
- 4) Meninjau kembali jadwal reses Anggota DPRD agar dapat dilaksanakan sebelum penyusunan dokumen perencanaan sehingga hasil reses dapat diimplementasikan didalam program pembangunan.

3. Proses evaluasi yang dilaksanakan hendaknya ditingkatkan, jika selama ini yang menjadi bahan evaluasi hanya sebatas input dan output harus ditingkatkan sampai dengan *outcome*, *impact* dan *benefit*. Selanjutnya bahan evaluasi harus menjadi bahan pertimbangan didalam proses penyusunan program di tahun berikutnya.

Universitas Terbuka

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alkadri, Dodi Slamet Ryadi, 1999 "*Manajemen Teknologi untuk pengembangan Wilayah*", Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- Anderson, A.L & Kyprianov, A, 1994, *Effective Organization Behaviour A Skill And Activity-Based Approach*, LA USA, 2000: Blackwell Bussines.
- Bungin, Burhan M, 2009, *Penelitian Kualitatif "Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya"*, Jakarta: Kencana.
- Bob Wall, Robert S Solum and Mark R. Sobol, 1999, "*The Visionary Leader*" Interaksara Press, Batam Center
- Dessler, Gary, 1985, *Manajemen Sumberdaya Manusia: Human Resource Management*, Jakarta: Prenhallindo
- Effendy, Onang U, 1989, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: CV.Mandar Maju
- Esmara, Hendra, 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia
- Etzioni, Amitai, 1982, *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: Terjemahan Suryatim, UI Press.
- Frederickson, H. George, 1984, *Administrasi Negara baru*, Jakarta: (cetakan-keempat) LP3ES.
- French, Wendell and Bell Jr, Cecil H, 1995, *Organization Development Behavioral Science Interventions for Organization Improvement*, Washington: Prentice Hall International.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M & Donnely, J.H.Jr, 1990, *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*, Jakarta: Erlangga.
- Grindle, Merilee S., 1997 *Getting Good Government*, Harvard University Press.
- Hicks, F. Hebert & Ray C Gullet, 1975 *Organization: Theory and Behavior*, New York: Mc Graw-Hill Inc.
- Henry, Nicholas, 1988, *Public Administration and Public Ad-Affairs*, New York: Prentice-Hall

- Herzberg, Frederick, Bernard Mauser, Barbara Bach Snyderman, 2009, *The Motivation to work*, New York 1959 12<sup>th</sup> Printing: Wiley Publisher
- John C. Maxwell, 2002, *"The 17 Indisputable Law of Team Work"*, Nashville: Thomas Nelson Publisher & The Joy Group.
- Kasim, Azhar, 1993, *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi Pusat antar Universitas Ilmu-ilmu, Sosial*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kristiadi, J.B. 1994, *Revitalisasi Birokrasi dalam meningkatkan Pelayanan Prima Bisnis dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi No.3 Volume 2.
- Lewis A. 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Moleong, Lexi J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, 1988, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali
- Nasir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Neuman, W Lawrence, 2007, *Basic of Social Research, Qualitative an Quantitative Approaches*, Boston USA: Person Education, Inc and University of Wisconsin, Whitewater, Second edition.
- Osborne, David dan Gaebler, 1992 *Re-Inventing Government*, New York: Rending Mass Addition.
- Osborne, David and Plastrick, Peter, 1997., *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for reinventing government*, New York USA: Perseus Books Publishing.
- Robert C. Bingham, 1987, *"Study Guide to Accompany Mc. Connell: Economics"*, New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Robbins, S.P, 1994, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Arcan.
- Salusu, J. Prof. Dr, 1996, *"Pengembangan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit"*, Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia.
- Sedarmayanti, 2004, *"Good Governance: Kepemerintahan yang baik, membangun Sistem Manajemen Kinerja"* Bandung: CV. Mandar Maju.

- Senge, Peter, 1995, *Fifth Discipline*, New York: Double Day Press.
- Siagian, Sondang P, 1997, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Slamet, M. 1985 *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Interaksi.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1988, *Metodelogi Penelitian; Untuk ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Edisi Revisi, UPP AMP YKPN.
- Sudarso, 1988, *Sistem membaca Cepat dan Efektif*, Jakarta: PT. Gramedia
- Suwardi Luis, B. Psy., MBA dan Dr. Ir. Prima A. Biromo, 2009, *“Step by Step in Cascading Balanced Scorecards to Functional Scorecards*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Steer, Richard M, 1985, *Organisation Effectiveness a Behavior View*, New York: Good Year Publishing Co.
- Supardi & Anwar, Syaiful, 2002, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Syafrizal, 1985, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: LP3ES
- Thoha, Miftah, 2002, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Thung, DL Kusuma, Ir, 1976, *“Production Management: Teknik-teknik Management II*, Jakarta: Univ. Trisakti.
- Trout, Jack and Steve Rivkin, 2004, *“The Power of Simplicity”*, New York: Mc.Graw-Hill Companies.
- Wimmer, RD & Dominick, JR, 2000, *Mass Media Research: An Introduction*, California, Belmont: Wadsworth Publishing Company.

## **B. Dokumen**

- Bappeda Bangka Belitung, 2007 *Rencana Strategis SKPD*, Dokumen.
- Bappenas, 2002 *“Safe Guarding: Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah”* Jakarta: Bappenas dan Depdagri
- Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, 2009, *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*, Jakarta: Bappenas.

Dirjen Multirateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri R.I, 2002, "*Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan*", Jakarta: UNDP

Lembaga Administrasi Negara, 2008, *Teori dan Indikator Pembangunan*, Dokumen LAN.

Lembaga Administrasi Negara, 2009, *Pusat Kajian Management Kebijakan, "Manajemen Kinerja"* Modul-Modul Penerapan, LAN-R.I.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*

### C. Refferensi

Myers, Michael D, diunduh pada tanggal 3 September 2010, *Qualitative Research in Information System*, Situs  
Web:<http://www.qual.auckland.ac.nz>

Lampiran 1. Pedoman dan Daftar Wawancara Efektivitas Organisasi Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Lampiran 1.1**

---

**A. Identitas Narasumber/informan:**

1. Nama : Drs. Abdullah Ma'aruf
2. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
3. Instansi/Lembaga : DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**B. Daftar Pertanyaan:**

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah sesuai. karena struktur yang ada pada Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini merupakan implementasi dari PP Nomor 41 Tahun 2007, dimana setiap peraturan yang dibuat tentunya telah dikaji secara mendalam.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya. Efektif dan efisien tentunya. Dengan jumlah struktur organisasi yang lebih "ramping" dibandingkan sebelumnya Bappeda dan Statistik tetap mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Mungkin hanya penajaman pada tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada di Bappeda itu sendiri, terutama dalam rangka untuk menghindari terjadinya tumpangtindih kewenangan dengan SKPD lain seperi yang masih sering terjadi saat ini. Harus dijelaskan bagaimana fungsi dan kedudukan Bappeda dan dimana fungsi dan kedudukan SKPD lain di dalam suatu urusan.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah suatu langkah atau tahapan awal sebelum dimulainya suatu kegiatan, didalam perencanaan dipertimbangkan*

*apa yang menjadi tujuan, bagaimana melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu forum tahunan yang dilaksanakan dalam rangka untuk menghimpun aspirasi masyarakat atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di tahun berikutnya, musrenbang dilaksanakan mulai dari kelompok masyarakat terkecil (desa) hingga tingkat nasional.*

5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat beberapa kendala, terutama yang berasal dari kalangan legislative, dimana biasanya usulan program yang telah dibahas dari tahapan paling bawah masih bias dirubah dengan beberapa alasan antara lain, masih kurangnya kesadaran rekan-rekan di legislative untuk turun sejak awal didalam pelaksanaan musrenbang dari tingkat kecamatan atau kabupaten yang menjadi dapilnya masing-masing, kemudian terkait dengan waktu masa reses Anggota DPRD yang baru dilaksanakan setelah pelaksanaan musrenbang sehingga hasil reses yang merupakan penjarangan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen mereka belum diakomodir didalam pelaksanaan musrenbang sehingga seringkali di tahapan akhir proses penyusunan rencana pembangunan tiba-tiba muncul kegiatan yang diusulkan tidak melalui musrenbang.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Bappeda harus memiliki fungsi perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang menjadi satu kesatuan bagian.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Sudah cukup baik, hanya saja diharapkan adanya koordinasi antara fungsi perencanaan dengan fungsi penganggaran, sehingga proses perencanaan yang dibangun sudah selaras dengan kemampuan keuangan. RKPD, RPJMD dan RKPD sebagian besar sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun*

*sebaiknya dokumen perencanaan tersebut dibuat lebih kuantitatif terutama RKPD dan kemudian RPJMD sehingga target dan sasaran dari rencana dapat terukur dengan baik yang pada akhirnya akan memudahkan untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah didalam pembangunan.*

Universitas Terbuka

## Lampiran 1.2

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Rustam Effendi, B.Sc
2. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
3. Instansi/Lembaga : DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Cukup efektif. Efektif dalam arti pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan struktur terdahulu namun belum cukup memberikan nilai tambah bagi pemerintah provinsi secara umum. Mungkin yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah penataan SDM, dimulai dari penempatan SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya terutama bagi pejabat struktural dan pegawai Bappeda itu sendiri.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Adanya jabatan wakil kepala Bappeda ataupun SKPD lainnya, dibutuhkan dalam rangka peningkatan koordinasi intern lembaga itu sendiri. Wakil kepala sebaiknya memiliki tingkat eselon yang berada di bawah kepala Bappeda namun harus berada diatas sekretaris atau kepala bidang. Idealnya wakil ketua setingkat eselon IIb.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah proses yang berkelanjutan, bertahap dan tertata rapi. Artinya perencanaan tidak bersifat mutlak, kaku tetapi ada peluang untuk perbaikan dan sisipan kebijakan baru. Dengan*

*demikian perencanaan adalah proses yang berkelanjutan dalam rangka menyempurnakan aktifitas untuk mewujudkan tujuan bersama. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu forum tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan untuk menghimpun aspirasi masyarakat atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di tahun berikutnya,*

5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Sudah. Sesuai dengan sifatnya yang partisipatif artinya perencanaan telah melibatkan semua unsur yang dimulai dari tingkatan terendah*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Litbang. Dengan harapan setiap output yang dihasilkan oleh Bappeda merupakan sesuatu yang visible untuk dilaksanakan. Litbang tidak hanya dilakukan untuk mendukung fungsi perencanaannya saja tapi juga evaluasi, dimana setiap kegiatan yang telah dilakukan seharusnya dievaluasi dengan kajian yang mendalam sejauh mana program yang telah dilaksanakan tersebut mampu member dampak bagi pembangunan sebagai suatu kesatuan yang pada akhirnya hasil kajian evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dimasa yang akan datang.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Sudah baik dari sisi pelaksanaan fungsi sebagai lembaga perencana namun belum diikuti dengan fungsi evaluasi dimana selama ini evaluasi hanya dilaksanakan untuk melihat realisasi fisik dan keuangannya saja belum menyentuh sampai kepada dampak yang dirasakan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Secara harfiah RKPD, RPJMD dan RKPD sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dikarenakan sifatnya yang kualitatif sehingga dokumen tersebut sangat implementatif dalam*

*mengkaitkan atau menghubungkan suatu kegiatan dengan program-program yang ada.*

Universitas Terbuka

### Lampiran 1.3

#### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Ir. Elfiyena
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Sekretaris
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Belum, seharusnya ada suatu bidang yang melaksanakan pengembangan SDA mengingat karakteristik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap SDA.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Jika tolak ukur efektif adalah kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka saya menganggap struktur yang ada sudah cukup efektif.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Yang harus menjadi pertimbangan adalah ketergantungan Bangka Belitung terhadap SDA baik yang bersifat terbaharukan maupun yang non terbaharukan, sehingga diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dapat lebih optimal.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah proses mengarahkan kegiatan manusia dan sumber daya alam dengan berorientasi ke masa depan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh*

*dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya.*

5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Sudah.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Pegawai-pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian lintas sektoral.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Eksistensi sudah mulai dirasakan namun belum berjalan optimal, indikasi tersebut masih terlihat bahwa untuk usulan kegiatan yang dibiayai melalui sumber dana APBN, masih ada SKPD yang tidak menganggap bahwa Bappeda memiliki peranan penting dan SKPD tersebut lebih suka jika langsung berkoordinasi dengan kementerian terkait.*

## Lampiran 1.4

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Juadi, SP., MP
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Bidang Ekonomi
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Ya jika ditinjau dari sisi fungsi Bappeda dan Statistik sebagai koordinator SKPD dalam hal perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, artinya bidang-bidang yang ada di Bappeda dan Statistik sudah cukup mampu mengkoordinir SKPD di lingkungan Pemprov. Kep. Babel dalam hal perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, namun ditinjau dari sisi fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Statistik masih banyak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang Bappeda dan Statistik dengan SKPD/Lembaga lain. Misalnya, berdasarkan PP 41 Tahun 2007, nomenklatur yang semula Bappeda menjadi Bappeda dan Statistik, namun tugas dan kewenangan dalam mengelola data-data statistik sampai dengan saat ini masih menjadi tugas dan kewenangan Badan Pusat Statistik Provinsi yang artinya data-data yang diolah oleh Bappeda dan Statistik tidak akan diakui validitasnya.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Berbicara efektivitas tentu harus diketahui indikator keberhasilan atau target kinerja yang hendak dicapai dan juga harus membandingkan indikator tersebut antara sebelum dan sesudah struktur tersebut dirubah. Jika indikator yang digunakan adalah ketepatan/kesesuaian antara program yang dilaksanakan terhadap dokumen perencanaan yang ada (RPJMD dan Renstra) maka struktur Bappeda dan Statistik saat ini sudah dirasakan sudah*

- efektif karena ada trend peningkatan dari indikator tersebut setiap tahunnya.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
    - a. *Jika Balitbangda belum juga dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sebaiknya tugas penelitian dan pengembangan dapat diakomodir menjadi satu bidang tersendiri dan tidak melekat lagi pada Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Statistik seperti saat ini. Mengingat Bidang Litbang ini nantinya diharapkan mampu menghasilkan kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang hasilnya akan bermanfaat bagi perencanaan yang ditinjau dari sisi akademis.*
  4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
    - a. *Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Sedangkan musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya.*
  5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
    - a. *Sampai saat ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah melalui proses perencanaan yang baik, dimana hampir seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan dokumen – dokumen perencanaan yang ada, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih diluar dokumen perencanaan namun karena sifatnya mendesak dan situasional sehingga harus dilaksanakan, namun hanya sedikit sekali yang seperti itu.*
  6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?

- a. *Dalam suatu proses perencanaan tentu saja dibutuhkan suatu kajian secara akademis untuk melihat apakah suatu kegiatan yang akan direncanakan benar-benar memiliki manfaat bagi pembangunan. Dalam hal ini kajian tersebut dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, namun karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki Badan tersebut maka tugas pokok dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu bidang baru yang khusus melakukan kajian-kajian akademis. Atau jika SDM-nya tersedia maka jabatan fungsional perencanaan yang ada di Bappeda dan Statistik dapat dihidupkan.*
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
- a. *Bappeda seharusnya memiliki peranan penting didalam proses pembangunan, dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda seharusnya mampu mengkoordinir SKPD agar melakukan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Di Bangka Belitung dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah menunjukkan hal tersebut, dimana tingkat kesesuaian program pembangunan terhadap RPJMD terus meningkat. RPJP dan RPJMD menurut saya, saat ini masih sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat, karena RPJP dan RPJMD yang ada dibuat bersifat kualitatif dan dibuat cakupan program yang seluas-luasnya yang akan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.*

## Lampiran 1.5

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Drs. Munawar
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Belum jika indikator yang digunakan adalah menyangkut tugas pokok dan fungsi, sebagai contoh nomenklatur statistik yang melekat ternyata tidak disertai fungsi sebagai pengolah data statistik, kemudian untuk fungsi penelitian, sampai saat ini belum adanya SDM yang memiliki basis peneliti membuat nomenklatur tersebut hanya seperti sebuah nama tanpa fungsi. Sebaiknya dilakukan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian di bidang penelitian atau dibentuk bidang khusus yang menangani masalah penelitian atau jika memang dianggap tidak efektif dapat dibuang saja fungsi penelitian yang ada pada Bappeda. Selain itu, hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang selama ini dilaksanakan belum dijadikan sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Jika indikator efektif adalah kinerja, maka jawabannya adalah efektif. Artinya semua yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dapat dikerjakan dengan baik, tepat waktu dan tertib administrasi.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Faktor karakteristik sebagai wilayah dengan luas lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Mungkin diperlukan satu*

*bidang khusus yang menangani masalah kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil.*

4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi untuk mengembangkan strategi yang optimal terkait tindakan masa depan untuk mencapai seperangkat tujuan yang diinginkan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.*
  
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Sudah.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Memiliki kemampuan secara akademis untuk melakukan suatu kajian yang bermanfaat sebagai bahan bagi perencanaan program pembangunan.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Belum cukup diakui eksistensinya, sebagai contoh masih banyak SKPD yang memaksa untuk mengusulkan program pembangunan diluar dokumen perencanaan yang ada. Sudah cukup mengakomodir namun masih sering tidak dilaksanakan dengan berbagai macam alasan.*

## Lampiran 1.6

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Moertono, ST
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Ya secara struktural, namun masih banyak tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bappeda tumpang tindih dengan SKPD lain, sebagai contoh pada Bidang Fisra, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya fungsi tugas yang berkenaan dengan tata ruang berada di Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Tata Ruang sebagaimana di tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang, namun yang terjadi saat ini, fungsi yang terkait dengan tata ruang masih banyak dilakukan oleh Bappeda dan Statistik.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya dan efisien tentunya, artinya jika dulu hampir setiap bidang yang ada pada Bappeda terdiri dari 3 sub semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan ternyata saat ini meskipun hampir setiap bidang hanya memiliki 2 sub bidang namun tidak berdampak pada penurunan kinerja Bappeda, tentu saja indikator yang digunakan adalah realisasi serapan anggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Adanya satu bidang yang khusus melakukan kajian-kajian terhadap program kegiatan yang akan direncanakan maupun*

*kajian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Tentu saja harus disiapkan dulu SDM yang memiliki kompetensi untuk hal tersebut, dapat dilakukan pelatihan atau rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan untuk jabatan fungsional tersebut.*

4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah sesuatu yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan – kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah.*
  
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Masih belum, artinya masih banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui forum RKPD dan Musrenbang. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut biasanya muncul pada saat pembahasan di tingkat legislative.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Jabatan fungsional perencanaan.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Saat ini sudah cukup memiliki eksistensi, dimana setiap usulan program pembangunan yang diusulkan SKPD harus melalui Bappeda dan Statistik sekalipun program tersebut bersumber dari APBN. Belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat karena keterbatasan anggaran, artinya program kegiatan yang direncanakan belum tentu dilaksanakan mengingat adanya suatu constrain berupa kendala keterbatasan anggaran. Mengingat khusus untuk RPJP dan RPJMD telah disusun tanpa*

*memperhitungkan kemampuan keuangan daerah pada tahun pelaksanaan, begitu juga RKPD disusun hanya berdasarkan proyeksi anggaran sehingga masih ada kemungkinan Program dalam RKPD pun tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.*

Universitas Terbuka

## Lampiran 1.7

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Rihadi Rozak, SH., M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Bidang Sosial Budaya
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah. Tapi tetap perlu dilakukan penguatan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan. Namun secara tugas pokok dan fungsi, masih banyak tugas koordinasi yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan inefisiensi, misalkan yang terjadi di bidang Sosbud, kegiatan PNPM yang dilaksanakan oleh SKPD lain namun dalam hal tertentu Bappeda dan Statistik ditunjuk selaku ketua di dalam kegiatan tersebut.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya. Pasca dilaksanakannya PP 41 Tahun 2007 terjadi efisiensi pada tingkatan jabatan struktural namun telah diantisipasi dengan penguatan pada tingkatan staff sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan dan koordinasi berdasarkan eselonering semakin mudah dilakukan.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Jika harus dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi saat ini, jika memungkinkan diadakannya jabatan Wakil Kepala Bappeda dengan yang setingkat eselon IIb, mengingat aktivitas dan mobilitas Kepala Bappeda dan Statistik yang sangat tinggi, diharapkan Wakil Kepala Bappeda mampu menggantikan peran dan fungsi Kepala Bappeda selama Kepala bappeda melaksanakan tugas diluar kantor, dengan tingkat eselon yang berada diatas*

*kepala bidang diharapkan Wakil Kepala Bappeda nantinya akan mampu mengkoordinir kepala bidang yang ada dan kepala bidang harus melaksanakan perintahnya mengingat level eselon yang lebih tinggi.*

4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya terhadap RPJMD. Dalam musrenbang diberi kesempatan kepada para pelaku pembangunan untuk mengusulkan program kegiatan yang dianggap sangat mendesak untuk dilakukan.*
  
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Sudah melalui proses perencanaan yang sesuai, artinya semua kegiatan pembangunan sudah sesuai dengan RPJMD.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Seluruh pegawai Bappeda diharuskan memiliki sertifikasi perencanaan atau minimal pernah mengikuti pelatihan-pelatihan perencanaan sehingga diharapkan mampu mengarahkan pembangunan menjadi lebih baik.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Sudah memiliki eksistensi, terlihat dari peran aktif SKPD dalam berkoordinasi untuk penyusunan rencana kerja tahunan, baik kegiatan yang didanai oleh APBD maupun APBN. RPJP, RPJMD dan RKPD sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas namun dalam pelaksanaannya masih banyak program yang ada pada dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam alasan.*

## Lampiran 1.8

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Rita Zahara, S. Kom
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan Pusat Data
3. Instansi/Lembaga : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Belum. Maksudnya struktur yang ada saat ini belum diikuti oleh pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur itu sendiri. Misalnya, pada bidang Pengendalian, Penelitian dan Statistik, sampai saat ini fungsi penelitian dan statistik belum dilaksanakan secara optimal.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya, dengan indikator pelaksanaan tugas dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda dengan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tapi bisa juga menjadi tidak efektif jika melihat masih banyaknya fungsi yang tidak berjalan dengan baik di Bappeda dan Statistik.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Beberapa tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang selama ini masih tumpang tindih dan tidak optimal dilaksanakan sebaiknya dikaji ulang, apakah fungsi tersebut akan dioptimalkan atau dieliminir dari fungsi Bappeda dan Statistik, sebagai contoh, fungsi statistik dan fungsi penelitian. Khusus untuk fungsi statistik sebaiknya dihilangkan saja karena fungsi statistik sudah melekat di BPS sedangkan fungsi penelitian jika ingin dioptimalkan sebaiknya dijadikan satu bidang yaitu bidang penelitian dan pengembangan yang tentu saja pembentukan*

*bidang ini harus disertai dengan tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.*

4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menentukan dan membuat strategi untuk mencapai tujuan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membangun kesepakatan – kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rancangan kerja pemerintah daerah yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.*
  
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Ya sudah sesuai, berjenjang dari tingkatan pemerintah desa hingga pemerintah pusat.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Harus memiliki kelompok jabatan fungsional perencana dan bidang litbang.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Eksistensi Bappeda yang dirasakan saat ini masih belum optimal, hal ini diindikasikan bahwa masih banyak program kegiatan yang telah melalui pembahasan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan anggaran. Menurut saya, seharusnya dilakukan koordinasi antara fungsi perencanaan (Bappeda) dengan fungsi anggaran (DPPKAD) sehingga pada saat dimulainya proses perencanaan sudah ada pagu indikatif setiap SKPD dan pada saatnya SKPD akan menyusun program yang realistis dan sesuai dengan skala prioritas mereka. Dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat karena memiliki sifat kualitatif sehingga dapat diinterpretasikan sesuai kebutuhan.*

## Lampiran 1.9

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Deki Susanto, ST
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya, lebih efektif.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Faktor pengembangan kewilayahan mengingat kondisi geografis dengan jumlah pulau yang banyak dan tersebar, mungkin dibutuhkan satu bidang khusus seperti bidang pengkajian dan pengembangan prasarana wilayah.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang secara detail dalam menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.*
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Sudah.*

6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Adanya suatu jabatan fungsional.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Adanya anggapan bahwa Bappeda sebagai “tukang coret” sebenarnya justru telah menunjukkan adanya eksistensi Bappeda. Dokumen perencanaan tersebut sesungguhnya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun dalam implementasinya masih banyak yang tidak dilaksanakan mengingat beberapa hal antara lain keterbatasan anggaran dan adanya indikasi bahwa SKPD lebih suka melaksanakan program-program yang telah mereka laksanakan sebelumnya.*

## Lampiran 1.10

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : A. Fauzan Syahzian, S.Si., M. Env. M
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Ka. Sub. Bag. Penyusunan Perencanaan
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah sesuai.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya. Dengan berbagai indikator capaian kinerja seperti kesesuaian program pembangunan terhadap dokumen perencanaan yang ada menunjukkan peningkatan, indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang semakin baik dan capaian terhadap realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan oleh Bappeda menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Harus diatur kemabali tugas pokok dan fungsinya saja. Beberapa fungsi yang melekat pada Bappeda dan Statistik yang selama ini masih tumpangtindih dengan urusan yang dilaksanakan SKPD lain, seperti fungsi statistik, fungsi monitoring evaluasi dan fungsi tata ruang.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah suatu penerapan ramalan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, ekonomi dan politik, potensi sistem untuk berkembang, kepentingan daerah dan pelayanan masyarakat yang mencakup dalam sistem tersebut. Musyawarah perencanaan*

*pembangunan adalah suatu forum tahunan para pemangku kepentingan didalam pembangunan untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Musrenbang dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan yang bersifat partisipatif dimana didalam pelaksanaan hampir semua unsur masyarakat terlibat.*

5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik namun nilai atau hakikat dari proses perencanaan itu sendiri terkadang masih belum ideal dimana dalam proses perencanaan yang dilaksanakan terkadang mendorong masyarakat berpikir pragmatis dalam merencanakan dan mengusulkan program pembangunan. Akibatnya program yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah. Malah dalam keadaan tertentu, usulan masyarakat ini terkait dengan keinginan sekelompok orang yang dititipkan.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Lembaga yang mampu memberikan gambaran obyektif mengenai perkembangan yang terjadi atau pun mungkin terjadi dan tawaran langkah-langkah yang lebih pasti ke arah pemantapan pemulihan ekonomi dan terselenggaranya kembali pembangunan daerah di seluruh sektor, kawasan, dan wilayah.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Sudah cukup dirasakan eksistensinya namun perlu dioptimalkan karena Bappeda sebagai bagian dari pelaksana fungsi manajemen pemerintahan, apabila dapat memenuhi persyaratan bagi dan dapat membuktikan bahwa kehadiran dan kiprahnya dapat lebih memantapkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik (good governance), tentunya masih sangat diperlukan dan legitimate. RPJP, RPJMD dan RKPD sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat banyak karena dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut sudah melibatkan seluruh unsur masyarakat dan perwakilannya.*

## Lampiran 1.11

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Martini, ST
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Ka. Sub. Bid. Tata Ruang Bidang Fisra
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah namun memiliki kelemahan dimana saat ini Bappeda dan Statistik hanya terdiri dari pejabat struktural yang setiap saat dapat dipindahkan.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya, lebih efektif. Lebih mudah dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pejabat eselon secara hierarkhi.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Beban kerja, maksudnya tidak dapat disamaratakan disetiap bidang memiliki 2 sub bidang tapi lebih kepada melihat jumlah mitra (counterpart) yang dikoordinir oleh bidang tersebut. Misal; bidang fisra dengan jumlah mitra sebanyak 3 SKPD memiliki 2 sub bidang dan bidang ekonomi dengan jumlah mitra sebanyak 12 SKPD yang juga memiliki 2 sub bidang.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah proses bagaimana tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilaksanakan untuk menyepakati*

*Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran yang direncanakan*

5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Sudah secara procedural, namun pelibatan partisipasi masyarakat masih cukup minim.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Adanya fungsi penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Eksistensi yang telah ditunjukkan oleh Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memberikan otoritas sebagai koordinator SKPD dalam hal perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. RPJP dan RPJMD secara luas telah mengakomodir kebutuhan masyarakat namun masih secara umum dan kualitatif mengingat sifatnya yang jangka panjang dan menengah namun RKPD lebih mampu mengakomodir karena bersifat jangka pendek jadi dapat berdasarkan isu-isu actual dan kebutuhan terkini.*

## Lampiran 1.12

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Melani, ST
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Staf Sub. Bid. Tata Ruang Bidang Fisra
3. Instansi/Lembaga : Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Belum, jika melihat jumlah counterpart masing-masing bidang. Setiap bidang memiliki 2 sub bidang tidak didasari oleh jumlah counterpart yang menjadi mitra pada masing-masing bidang.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya, dengan asumsi semua pekerjaan tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun secara struktural terdapat reorganisasi berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Jumlah counterpart pada masing-masing bidang, untuk bidang yang memiliki counterpart banyak dimungkinkan mempunyai sub bidang yang lebih banyak.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan daerah dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia.*

5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Ya. Sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2004.*
  
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Aparatur yang bekerja pada Bappeda harus memiliki kemampuan baik akademis maupun teknis yang berkenaan dengan perencanaan.*
  
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
  - a. *Sudah cukup baik. Secara luas dokumen perencanaan yang ada sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat karena sifat kualitatif yang dimilikinya terutama untuk RPJP dan RPJMD, target dan sasaran masih sangat kualitatif sehingga penafsiran terhadap program pembangunan menjadi lebih fleksibel.*

### Lampiran 1.13

---

#### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Drs. Iskandar. Z., M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Dinas
3. Instansi/Lembaga : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Belum. Seharusnya perlu dibuat suatu bidang yang mampu melakukan kajian-kajian terhadap seluruh potensi yang ada sehingga hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan yang komprehensif dan layak untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Ya, jika melihat kecenderungan meningkatnya kualitas perencanaan yang dilaksanakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program pembangunan dengan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan yang ada.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Faktor karakteristik provinsi kepulauan, faktor pengelolaan dan pemanfaatan SDA, sebaiknya dibentuk struktur setingkat eselon IV untuk mengakomodir kekhususan sesuai dengan karakteristik wilayah.*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?

- a. *Perencanaan adalah usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan di berbagai tingkatan (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional) untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan.*
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
- a. *Ya secara prosedur namun dalam pelaksanaannya masih belum mencerminkan perencanaan yang partisipatif, maksudnya keterlibatan masyarakat secara langsung terutama pada tingkatan musrenbang desa dimana usulan yang disampaikan masih belum menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau masih hanya berupa keinginan dari beberapa pihak saja sehingga masih banyak ditemui berbagai proyek kegiatan pemerintah tidak secara utuh mampu dirasakan oleh masyarakat.*
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
- a. *Memiliki SDM bidang perencanaan dari berbagai disiplin ilmu. Adanya struktur jabatan fungsional perencana di dalamnya.*
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
- a. *Belum maksimal, dimana masih belum ada keseimbangan antara fungsi perencanaan. Saat ini kinerja lebih ditonjolkan pada sisi perencanaan sementara fungsi evaluasi masih minim artinya evaluasi yang telah dilaksanakan selama ini belum pernah dijadikan sebagai suatu acuan bagi perencanaan di tahun berikutnya. Dokumen perencanaan yang ada sudah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas terutama RKPD yang disusun berdasarkan isu strategis yang berasaskan tema kekinian.*

## Lampiran 1.14

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : M. Amin Choiri, SE., M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kasi Anggaran I
3. Instansi/Lembaga : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Sudah, selama diikuti dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Belum, karena tingkat kinerja antara sebelum dan sesudah perubahan struktur organisasi belum menghasilkan sesuatu yang lebih baik, maksudnya jika diukur dengan tingkat realisasi capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Statistik belum konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika yang dijadikan tolak ukurnya adalah kesesuaian program pembangunan dengan dokumen perencanaan yang ada, maka struktur yang ada saat ini lebih menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Harus memperhatikan kebutuhan daerah yang dilandasi oleh keunggulan dan karakteristik serta kebutuhan daerah. Bisa saja suatu keunggulan atau karakteristik yang dimiliki daerah memerlukan penanganan khusus sehingga diperlukan struktur khusus yang membidangi masalah tersebut*
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?

- a. *Perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumberdaya yang ada. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum multi pihak yang secara bersama dan terbuka mengidentifikasi dan menyusun rencana pembangunan masyarakat.*
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
- a. *Belum, karena tidak jarang dijumpai kekecewaan masyarakat terhadap proses Musrenbang ini karena banyaknya usulan mereka yang tidak dapat dibiayai. Biasanya ini terkait dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.*
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
- a. *meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, evaluasi.*
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?
- a. *Sudah memiliki eksistensi terutama dalam hal penyelarasan antara program pembangunan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Dokumen perencanaan yang ada saat ini secara garis besar sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama karena sifatnya yang kualitatif sehingga lebih aplikatif untuk dilaksanakan dan program yang ada dapat dikaitkan dengan beberapa kegiatan.*

## Lampiran 1.15

---

### A. Identitas Narasumber/informan:

1. Nama : Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Dinas
3. Instansi/Lembaga : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Saudara/i, apakah struktur organisasi Bappeda dan Statistik saat ini sudah sesuai?
  - a. *Belum. Struktur yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan perencanaan di daerah terutama terhadap sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Sebagai contoh, urusan kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu sektor unggulan daerah saat ini berada dibawah koordinator bidang ekonomi Bappeda. Namun berbicara kelautan dan perikanan bukan hanya sebatas produksi yang memiliki nilai ekonomis semata, tapi didalamnya juga terdapat pengembangan wilayah pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga menurut saya perlu dibentuk suatu bidang pengembangan kelautan dan perikanan dengan sub bidang yang berkenaan dengan urusan kelautan perikanan sebagaimana tersebut diatas.*
2. Apakah struktur Bappeda dan Statistik saat ini menjadi lebih efektif jika dibandingkan struktur terdahulu?
  - a. *Belum, karena suatu objek masih ditangani oleh berbagai bidang. Ketika berbicara masalah produksi perikanan maka kita akan berbicara bidang ekonomi tapi ketika berbicara tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan dan pulau-pulau kecil maka kita akan berbicara bidang sosial budaya.*
3. Jika terpaksa dilakukan suatu perubahan, faktor-faktor apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merubah struktur Bappeda dan Statistik?
  - a. *Pembangunan harus dilakukan berdasarkan orientasi yang dilandasi pada keunggulan dan karakteristik daerah. Sektor-sektor*

*yang merupakan keunggulan daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam hal pengembangan dan perencanaannya, minimal dibutuhkan struktur setingkat eselon IV yang secara khusus membawahi sektor kelautan perikanan dimana nantinya sub bidang tersebut akan melakukan perencanaan, pengkajian dan pengembangan sektor kelautan secara utuh termasuk pengembangan SDM nya, wilayah pesisir, dsb.*

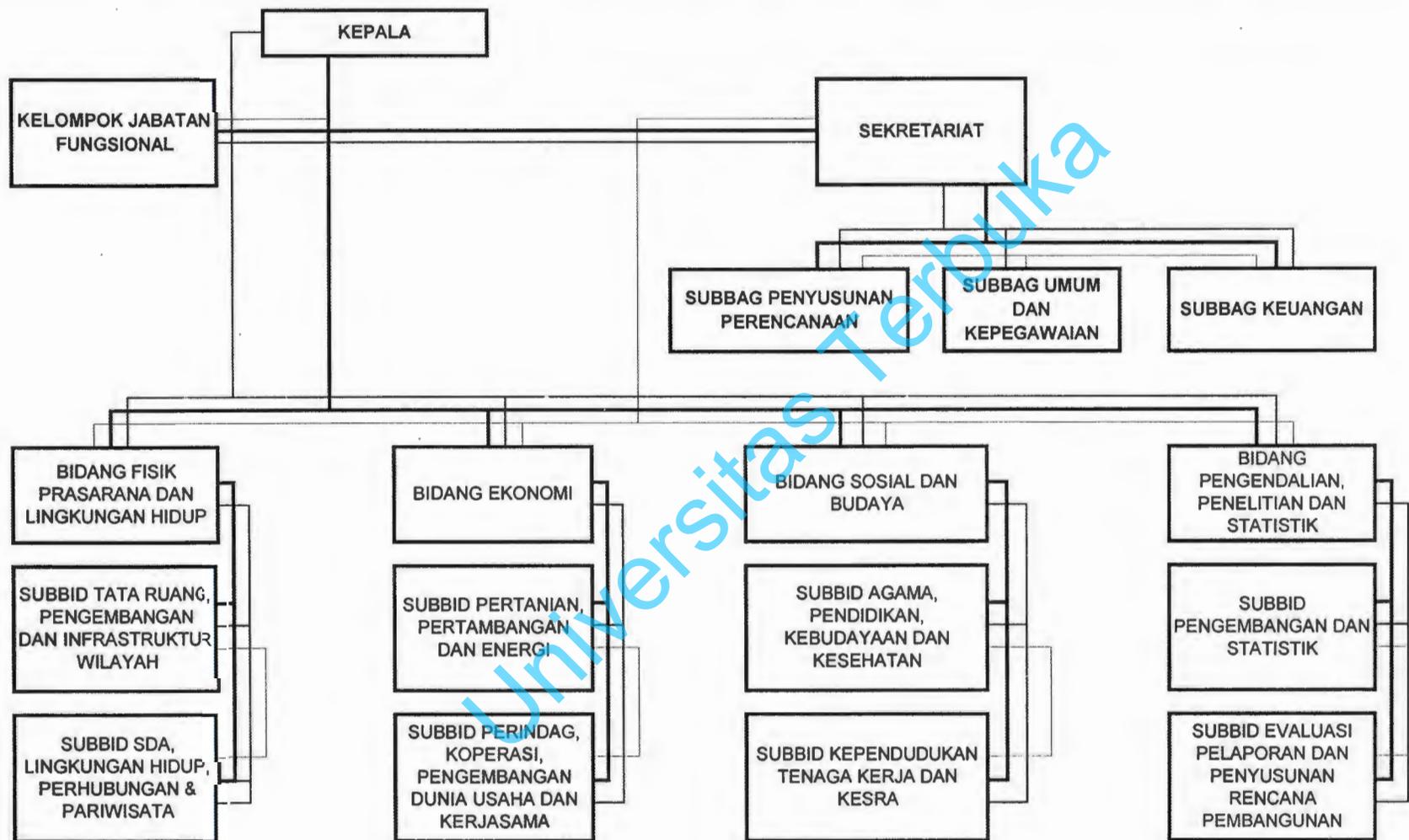
4. Apa yang Saudara/i pahami tentang perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan?
  - a. *Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah mekanisme untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang ini erat kaitannya dengan upaya pemerintah mencari legitimasi terkait program yang dilaksanakan.*
5. Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah melalui proses perencanaan yang sesuai?
  - a. *Belum, masih banyak program pembangunan yang naik di jalan karena terkait adanya sisa anggaran belanja daerah, ironisnya, program pembangunan di luar perencanaan ini datang dari anggota legislatif yang seharusnya mengawal proses Musrenbang ini. Keterlibatan anggota legislatif turut serta "mengacaukan" mekanisme Musrenbang ini disebabkan adanya tanggungjawab politik mereka kepada konstituen untuk merealisasikan janji politiknya, terutama terkait dengan pembangunan di daerah pemilihannya*
6. Kriteria seperti apa yang harus ada dalam lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berhasil?
  - a. *Sebagai wadah berbagai kegiatan perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor, lembaga, dan kawasan yang perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan.*
7. Apa yang Saudara/i lihat dan rasakan terhadap eksistensi lembaga Bappeda? Apakah dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJP, RPJMD, RKPD) mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara luas? Kenapa?

- a. *Belum dirasakan eksistensinya karena, Bappeda seharusnya mampu mengembangkan langkah-langkah kebijakan inovatif guna mewujudkan perkembangan masa depan yang lebih baik, termasuk pengembangan sistem pembiayaan alternative, bukan hanya melakukan langkah-langkah rutin saja. Fungsi sistem perencanaan adalah melakukan antisipasi perkembangan ke depan serta memberikan alternatif langkah yang harus ditempuh guna mencapai kondisi yang diharapkan atau pun untuk mencegah perkembangan yang tidak diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.*
- b. *Dokumen perencanaan saat ini sudah cukup mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat.*

Universitas Terbuka

## Lampiran 2

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



— Garis Komando

— Garis Tanggung Jawab

— Garis Koordinasi

## Lampiran 3

## JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Kegiatan / Waktu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1 Persiapan								
a. Proposal	■	■						
b. Penjelasan (UT)	■	■						
c. BTR		■						
d. Perbaikan Proposal			■	■				
2 Pelaksanaan								
a. Kuesioner			■	■				
b. Pengumpulan Data				■	■			
c. Analisis Data						■	■	
d. BTR II							■	
3 Penulisan Thesis						■	■	■
4 Pelaporan						■		■
5 Konsultasi/Bimbingan			■	■	■	■	■	
6 Pengesahan Thesis							■	■
7 Ujian / Sidang								■